

**LAPORAN
PENELITIAN MANDIRI LANJUT**



**Potensi Ekonomi Daerah Dan Peran UMKM dalam Usaha
Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Lebak**

Pengusul :

Arief Rahman Susila, S.E, M.Si

NIDN. 0013028203

Drs. C.B. Supartomo, M.Si

NIDN. 0022105203

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TERBUKA
2014**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL UT-LANJUT

Judul Kegiatan : Potensi Ekonomi Daerah dan Peran UMKM dalam Usaha Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Lebak

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 561 / Ekonomi Pembangunan

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : ARIEF RAHMAN SUSILA, S.E., M. S.i
B. NIDN : 0013028203
C. Jabatan Fungsional : Lektor
D. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
E. Nomor HP : 082122026933
F. Surel (e-mail) : ariefrs@ut.ac.id / arsusila@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

A. Nama Lengkap : Drs. C.B. SUPARTOMO., M. Si
B. NIDN : 0022105203
C. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 Tahun

Penelitian Tahun ke : 1

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 30.000.000,00

Biaya Tahun Berjalan :

- Diusulkan ke Dikti Rp 0,00
- Dana internal PT Rp 30.000.000,00
- Dana institusi lain Rp 0,00
- Inkind sebutkan



Tangerang Selatan, 24 – 11 – 2014,

Ketua Peneliti,

(Arief Rahman Susila, S.E., M.S.i)
NIP/NIK 198202132005011002

Menyetujui,
Ketua LPPM UT



DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

Ringkasan

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Uraian Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9

Bab II Tinjauan Pustaka

A. Definisi Usaha Kecil... ..	10
B. Definisi Usaha Menengah.....	10
C. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah.....	13
D. Teori Pengembangan Wilayah.....	15
E. Teori Basis Wilayah.....	16
F. Peranan Sektor Industri dalam Pengembangan Wilayah.....	16
G. Strategi Pengembangan Sektor Industri.....	17
H. Strategi Pengembangan Sektor UMKM.....	18
I. Pembangunan Sektor Industri dengan Kesempatan Kerja.....	21
J. Kondisi Umum UMKM di Indonesia Saat Ini.....	22
K. Permasalahan yang Dihadapi UMKM.....	25
L. Penelitian Terdahulu	30
M. Kerangka Pemikiran Penelitian	33

Bab III Metodologi Penelitian

A. Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Sumber Data	35
C. Kerangka Analisis Penelitian.....	35
D. Model dan Alat Analisis.....	37
1. Analisis SWOT.....	37

2. Analisis Deskriptif.....	40
3. Analisis LQ.....	40
Bab IV Hasil dan Pembahasan	
A. Analisis LQ....	42
B. Analisis Deskriptif Penyerapan Tenaga Kerja.....	44
C. Analisis SWOT.....	50
Bab V Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Perkembangan Pemasukan PDB dari UMKM dan Usaha Besar Tahun 2006-2010.....	3
2.1 Definisi Usaha Kecil dan Menengah.....	11
3.1 Matriks Analisis Penelitian.....	36
3.2 Matriks Analisis SWOT.....	37
3.3 Matriks Analisis SWOT Penelitian.....	38
4.1 Hasil Analisis Indeks <i>Location Quotient</i> (LQ) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2013.....	42
4.2 Pembagian Kawasan Kesesuaian Kecamatan.....	43
4.3 Kegiatan Informasi Pasar Kerja Tahun 2013.....	44
4.4 Jumlah Usaha Menengah dan Usaha Besar Menurut Kecamatan Tahun 2013.....	46
4.5 Jumlah Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin...	48
4.6 Jumlah Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012.....	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Perkembangan Jenis Usaha UMKM 2012 Di Kabupaten Lebak.....	6
2.1 Perkembangan Usaha UMKM dan Usaha Besar Tahun 2006-2010.....	23
2.2 Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Tahun 2006-2010.....	23
2.3 Kontribusi UMKM terhadap PDB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006-2010.....	24
2.4 Kerangka Penelitian.....	33
2.5 Langkah Teknis Tahapan Penelitian.....	34
4.1 Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2012.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1 Penggunaan Dana.....	65
2 Dukungan Sarana dan Prasarana.....	66
3 Biodata Ketua dan Tim Peneliti.....	67

RINGKASAN

Pada saat ini baik secara regional ataupun nasional harus menghadapi perubahan internal dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dengan berbagai masalah yang belum tuntas terpecahkan seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya mutu pelayanan publik dan kesenjangan antardaerah. Salah satu permasalahan yang timbul adalah masalah kemiskinan dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Pengembangan ekonomi lokal bukan merupakan hal yang baru, namun demikian konsep pengembangan ekonomi lokal dan teknik implemenasinya terus berkembang. Peranan UMKM dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis. Hal ini didukung oleh beberapa data indikator ekonomi makro UMKM yang cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan segmen terbesar pelaku ekonomi nasional. Perkembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi bagian penting dari pengembangan ekonomi Kabupaten Lebak. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM memerlukan suatu kajian yang komprehensif agar bisa memberikan informasi dan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi para stakeholder dalam mengembangkan UMKM. Kajian ini diperlukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan (1) Jenis produk dan komoditas UMKM apakah yang potensial dan perlu untuk dikembangkan di Kabupaten Lebak? (2) Bagaimanakah tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Lebak? (3) Bagaimanakah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan jenis UMKM dan produk unggulan tersebut?? Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Deskriptif, dan Analisis SWOT. Hasil dari LQ diketahui bahwa di Kabupaten Lebak terdapat 6 sektor yang merupakan sektor basis, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa. Kemudian penyerapan tenaga kerja sektor dominan berada dalam dalam sektor industri pengolahan. Sedangkan hasil SWOT diketahui bahwa strategi yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan potensi dari sektor industri pengolahan produk hortikultura, memperbaiki kualitas SDM, dan memberikan payung hukum mengenai jenis produk unggulan.

Kata Kunci : UMKM, Permasalahan UMKM, Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Deskriptif, dan Analisis SWOT

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Untuk itu pembangunan ekonomi rakyat seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional, karena tujuan pembangunan ekonomi rakyat sesuai dengan amanat konstitusi yaitu: meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi dalam sistem ekonomi nasional harus diarahkan kepada sistem ekonomi kerakyatan yang memberikan prioritas pembangunan ekonomi pada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pada akhir dasa warsa ini daerah-daerah telah tumbuh dengan sangat pesat dengan ditandai oleh tiga hal. Pertama, jumlah pengangguran dan setengah menganggur yang besar dan semakin meningkat. Kedua, proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri di kota hampir tidak dapat bertambah dan malahan mungkin berkurang. Ketiga, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya sudah begitu pesat sehingga pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan, dan transportasi yang memadai. Ketiga hal tersebut menjadi ciri khas dari setiap kota yang mengalami pertumbuhan kegiatan ekonomi dengan cepat. Studi yang dilakukan oleh Todaro (2000), dikatakan bahwa sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik seperti sangat bervariasinya bidang kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya), dan teknologi yang dipakai relatif sederhana. Para pekerja yang menciptakan sendiri lapangan kerjanya di sektor UMKM biasanya tidak memiliki pendidikan formal. Pada umumnya mereka tidak mempunyai ketrampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja. Oleh sebab itu, produktivitasnya dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah daripada kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Selain itu, mereka yang berada di sektor tersebut juga tidak memiliki jaminan keselamatan kerja dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan seperti yang dinikmati rekan-rekan mereka di sektor lain.

UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang

kecil, UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. UMKM justru mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang, misalnya untuk melakukan produksi yang bersifat substitusi impor dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Karena itu, pengembangan UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Perkembangan jumlah UMKM yang meningkat belum diimbangi dengan perkembangan kualitas UMKM yang masih menghadapi permasalahan klasik yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini secara langsung berkaitan dengan: (a) rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi, dan pemasaran; (b) lemahnya kompetensi kewirausahaan; (c) terbatasnya kapasitas UMKM untuk mengakses permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sementara itu, masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM di antaranya: (a) besarnya biaya transaksi akibat kurang mendukungnya iklim usaha; (b) praktik usaha yang tidak sehat; dan (c) keterbatasan informasi dan jaringan pendukung usaha. Selain itu, UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya perkembangan teknologi.

Kemampuan UMKM untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor, sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. Pertama, lingkungan internal UMKM mesti kondusif, yang mencakup aspek kualitas SDM, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat kewirausahaan (entrepreneurship). Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif, yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi global. Selain kedua kondisi tersebut, strategi pemberdayaan UMKM untuk dapat memasuki pasar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup UMKM.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan

dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.1. Perkembangan Pemasukan PDB dari UMKM dan Usaha Besar 2006-2010

Indikator	Satuan	2006 Jumlah	2007 Jumlah	2008 Jumlah	2009 Jumlah	2010 Jumlah
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	milyar	1035615	1100671	1165753	1212599	1282572
- Usaha Mikro (UM)	milyar	588505.9	620864	655703.8	682259.8	719070.2
- Usaha Kecil (UK)	milyar	189666.7	204395.4	217130.2	224311	239111.4
- Usaha Menengah (UM)	milyar	257442.6	275411.4	292919.1	306028.5	324390.2
Usaha Besar (UB)	milyar	734893	782878.2	832184.8	876459.2	935375.2

Sumber : Departemen Koperasi

Tentang komoditi yang kemungkinan berpeluang untuk dapat secara aktif diperdagangkan pada pasar regional/global yang kompetitif tersebut, tampaknya tidak ada pilihan, kecuali yang mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantages*). Komoditi tersebut terutama berasal dari sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan dan sektor kelautan khususnya subsektor perikanan serta sektor industri khususnya subsektor industri pengolahan dan industri kecil. Kemudian kualifikasi usaha yang mempunyai peluang untuk dapat mengembangkan usahanya sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia adalah kegiatan usaha yang mempunyai pengalaman/catatan (*track record*) yang baik terutama selama sepuluh tahun terakhir. Selanjutnya atas dasar pengalaman terutama di masa krisis tujuh tahun terakhir, pilihan untuk memprioritaskan kegiatan usaha (pengusaha) dengan skala usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah merupakan pilihan yang cukup bijaksana. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana mencermati kemungkinan yang akan terjadi dalam kegiatan ekonomi dunia, regional dan di Indonesia sendiri dalam kurun lima tahun ke depan.

Namun dalam perkembangannya, UMKM memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, diantaranya keterbatasan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan akses UMKM pada informasi pasar, lokasi usaha dan jejaring usaha agar produktivitas dan daya saingnya meningkat. Khusus untuk UMKM yang ada di Kabupaten Lebak, perkembangannya sudah sangat mengkhawatirkan. Pembangunan di Kabupaten Lebak, yang dulu gencar di sektor industri, kini sudah beralih ke sektor perdagangan dan jasa. Hal ini tentu saja mengancam keberadaan UMKM.

Masalah kemiskinan menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Suatu daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi sangat rentan terhadap goncangan ekonomi yang sedang terjadi. Kabupaten Lebak adalah daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Banten. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan penting yang akan dicapai untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar daerah adalah bukan untuk pemerataan pembangunan fisik di setiap daerah, tetapi yang paling utama adalah pengurangan kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta kemiskinan antar daerah.

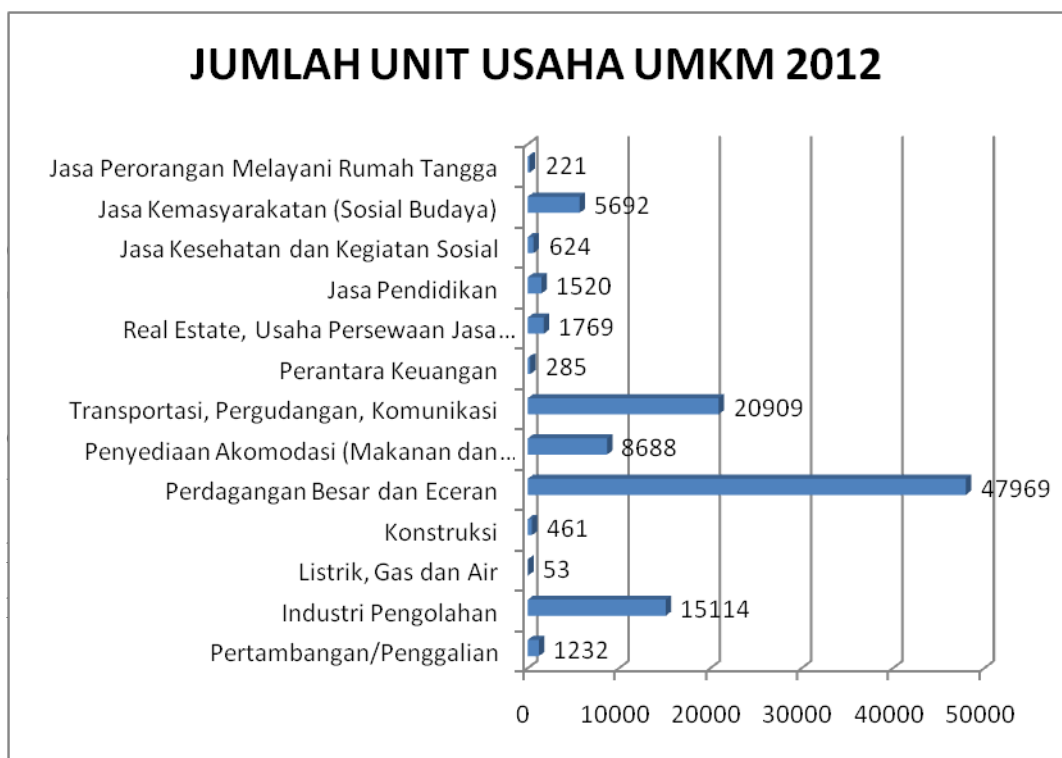
Globalisasi merupakan suatu fenomena yang mendorong perusahaan di tingkat mikro ekonomi untuk meningkatkan efisiensi agar mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Globalisasi juga menyatukan pasar dan kompetisi investasi internasional sehingga meningkatkan tantangan sekaligus peluang bagi semua perusahaan baik kecil, menengah maupun besar. Untuk menghadapi globalisasi maka diperlukan daya saing yang kuat. Daya saing merupakan kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional.

Pengembangan ekonomi lokal bukan merupakan hal yang baru, namun demikian konsep pengembangan ekonomi lokal dan teknik implementasinya terus berkembang. Secara umum pengembangan ekonomi regional atau lokal pada dasarnya adalah usaha untuk penguatan daya saing ekonomi lokal untuk pengembangan ekonomi daerah dan akumulasi kegiatan tersebut akan berpengaruh besar pada pengembangan daya saing ekonomi nasional dan penguatan daya saing ekonomi nasional. Salah satu faktor penting

yang mendukung penguatan daya ekonomi lokal adalah kinerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Peranan UMKM dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis. Hal ini didukung oleh beberapa data indikator ekonomi makro UMKM yang cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan segmen terbesar pelaku ekonomi nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM tahun 2010 mencapai 53, 82 juta unit, meningkat menjadi 55, 20 juta unit tahun 2011. Berdasarkan kategori, porsi yang paling besar adalah segmen usaha mikro yang mencapai sekitar 99% dari total jumlah UMKM (Depkop, 2012). Badan Pusat Statistik juga menjelaskan bahwa sektor tertinggi investasi yang dilakukan kalangan UMKM adalah di bidang jasa (57 persen), perdagangan (20 persen) dan manufaktur (23 persen). Besarnya skala bisnis sektor UMKM dan Koperasi diperkirakan mencapai 54 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Jumlah yang demikian besar tersebut menunjukkan, UMKM memiliki peran besar dalam menopang ekonomi nasional. Karena itu, pengembangan UMKM harus mendapat perhatian yang besar.

Perkembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi bagian penting dari pengembangan ekonomi Kabupaten Lebak. Sementara itu berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Tahun 2006 yang dilaksanakan oleh BPS diketahui jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Lebak berjumlah 104.537 unit usaha yang bergerak pada 13 jenis usaha. Rincian jenis dan jumlah usaha ditunjukkan dalam Gambar 1.1. sebagai berikut :



g masih
rasi dan
ber daya
batasnya

Sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah, banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM. Kendala pengembangan UMKM tersebut antara lain lemahnya manajemen usaha, belum berkembangnya sistem data dan informasi, serta terbatasnya jaringan pemasaran (BPS Kabupaten Lebak, 2010). Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah yang berasal dari luar atau masalah eksternal. Salah satu contoh masalah eksternal adalah iklim usaha, yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan UMKM. Iklim usaha tersebut mencakup : *pertama*, kemudahan dalam mengurus perizinan, *kedua*, kemudahan dalam memperoleh kredit dan *ketiga* adalah menumbuhkan kembali *reservation scheme* (cagar usaha) agar bidang usaha yang dimiliki UMKM tidak dicampuri oleh usaha lain yang memiliki skala yang lebih besar.

Tingginya peranan UMKM dalam perekonomian, tidak saja terjadi pada perekonomian Indonesia. Perekonomian di beberapa negara lain seperti Malaysia, Korea, Jepang, Taiwan, juga didukung oleh peranan UMKM yang cukup signifikan. Karena peranan yang begitu signifikan, maka di beberapa negara tersebut, diterapkan berbagai kebijakan khusus untuk mendorong perkembangan UMKM. Sebagai contoh misalnya di Korea dan Taiwan, keberadaan industri besar ditopang oleh banyak UMKM dalam proses produksinya, khususnya dalam penyediaan berbagai bahan terutama bahan penolong. Di negara ini keterkaitan antara usaha besar dan UMKM cukup tinggi, karena pola kemitraan yang dikembangkan cukup baik oleh pemerintah.

B. URAIAN MASALAH

Pertumbuhan ekonomi harus didorong untuk mencapai kesejahteraan penduduk serta mengurangi kesenjangan yang terjadi antara Kabupaten Lebak dengan wilayah sekitarnya terutama wilayah Jabotabek dan wilayah Banten bagian utara. Kabupaten Lebak sampai saat ini merupakan wilayah yang paling terbelakang diantara kabupaten dan kota di Propinsi Banten. Di samping itu, masih ada sekitar 40 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kawasan perdesaan sebagai basis utama dan bagian terbesar dalam wilayah Kabupaten Lebak, sangat membutuhkan percepatan pembangunan secara bertahap, proporsional dan berkelanjutan. Berbagai keterbatasan kapasitas dan ketertinggalan kondisi wilayah yang terdapat di perdesaan, senantiasa dihadapkan pada isu disparitas regional yang bersifat makro bahwa Kabupaten Lebak adalah salah satu dari 199 Daerah Tertinggal di Indonesia, yang sekaligus merupakan daerah terluas dalam wilayah Propinsi

Banten. Hal ini tentu berimplikasi terhadap kebutuhan mendasar atas ketersediaan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin keseimbangan antar sektor dan regional, yang berorientasi kepada pembangunan perdesaan.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak, yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi tersebut bisa berasal dari bidang agrobisnis, pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pertambangan dan energi, properti, dan pariwisata. Peran pemerintah daerah sebagai pihak pembuat kebijakan harus jeli untuk mampu melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak. Kebijakan dan rencana baik jangka panjang atau pendek yang diambil harus lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang tidak dikaitkan dengan masalah kemiskinan akan menimbulkan permasalahan jangka pendek dan panjang yang pada akhirnya akan membahayakan proses pembangunan itu sendiri. Mengangkat permasalahan kemiskinan dan mencari alternatif upaya penanggulangannya menjadi suatu prioritas dalam pembangunan merupakan suatu hal yang sangat tepat.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa keberadaan UMKM sangat diperlukan (Berry dkk, 2001), *pertama*, kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, UMKM sering meningkatkan produktivitasnya melalui investasi dan aktif mengikuti perubahan teknologi. *Ketiga*, UMKM diyakini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dibandingkan usaha besar. Namun demikian desakan arus globalisasi menjadikan UMKM begitu berat sehingga pemerintah daerah harus yang semakin serius dalam mengembangkan UMKM karena selama ini perkembangan UMKM lebih berpola pada jaring pengaman. Dengan menerapkan kebijakan yang tepat, maka arus globalisasi justru menjadi peluang karena semakin terbukanya pasar bagi UMKM, terutama di Kabupaten Lebak.

Pengembangan dan pemberdayaan UMKM memerlukan suatu kajian yang komprehensif agar bisa memberikan informasi dan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi para *stakeholder* dalam mengembangkan UMKM. Salah satu fokus penelitian yang penting untuk dilakukan berkaitan dengan pengembangan UMKM adalah penelitian tentang pengembangan komoditas unggulan UMKM. Atas dasar uraian tersebut, maka penelitian ini bermaksud mengkaji:

- a. Jenis produk dan komoditas UMKM apakah yang potensial dan perlu untuk dikembangkan di Kabupaten Lebak?
- b. Bagaimanakah tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Lebak?

- c. Bagaimanakah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan jenis UMKM dan produk unggulan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari latar belakang yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu, maka tujuan dari kajian ini adalah:

- a. Menganalisis jenis produk dan komoditas UMKM apakah yang potensial dan perlu untuk dikembangkan di Kabupaten Lebak.
- b. Menganalisis tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Lebak.
- c. Menganalisis upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan jenis UMKM dan produk unggulan tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah mengetahui sebaran kemiskinan di Kabupaten Lebak dan mengetahui seberapa besar pemanfaatan potensi daerah dan peran UMKM dalam usaha menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Lebak. Selain itu juga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan bagi pemerintah dalam perencanaan kebijakan tentang masalah kemiskinan di Kabupaten Lebak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Usaha Kecil

Badan Pusat Statistik mendefinisikan Usaha Mikro sebagai usaha yang memiliki tenaga kerja lebih dari 4 orang . Sedangkan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). World Bank mendefinisikan Usaha Kecil atau Small Enterprise, dengan kriteria: Jumlah karyawan kurang dari 30 orang; Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta; Jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta

Namun demikian pengertian terbaru mengenai Usaha Kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

B. Definisi Usaha Menengah

Pengertian Usaha Menengah menurut Badan Pusat Statistik adalah usaha yang memiliki tenaga kerja antara 20 orang hingga 99 orang. Sedangkan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

World Bank mendefinisikan Usaha Menengah atau *Medium Enterprise* adalah usaha dengan kriteria : Jumlah karyawan maksimal 300 orang; Pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta; Jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta. Sedangkan pengertian Usaha Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta upiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Secara detil berbagai defisnis usaha kecil dan menengah dipaparkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Definisi Usaha Kecil dan Menengah

Organisasi	Jenis Usaha	Kriteria
Biro Pusat Statistik (BPS)	Usaha Kecil	Pekerja 5 – 19 orang
	Usaha Menengah	Pekerja 20 – 99 orang
Bank Indonesia (BI)	Usaha Mikro (SK Dir BI No 31/24/KEP/ DIR Tgl 5 Mei 1998)	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin • Dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal dan teknologi sederhana • Lapangan usaha mudah untuk <i>exit</i> dan <i>entry</i>

	Usaha Menengah (SK Dir BI No 30/45/Dir/ UK tgl 5 Januari 1997)	<ul style="list-style-type: none"> • Aset < Rp 5 M untuk industri • Aset < Rp 600 juta diluar tanah & bangunan • Omzet tahunan < Rp 3 M
Bank Dunia	Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah karyawan < 30 orang • Pendapatan setahun < \$ 3 juta • Jumlah aset < \$ 3 juta
	Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah karyawan maksimal 300 org • Pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta • Jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta
Kementerian Koperasi dan UMKM (Undang-undang No. 20 tahun 2008)	Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah & bangunan) Lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta • Hasil Penjualan Tahunan (Omset/tahun) Lebih dari Rp.300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 Milyar
	Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah & bangunan) Lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 Milyar • Hasil Penjualan Tahunan (Omset/tahun) Lebih dari Rp. 2,5 Milyar sampai dengan paling banyak Rp. 50 Milyar

Sumber : Bank Indonesia dalam Sriyana, 2010

Sebagai acuan utama pengertian UMKM pada kajian ini mengacu pada Undang-undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008, yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

C. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang terjadi terus menerus dan bersifat dinamis. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil yang diterima oleh penduduk. Menurut (Todaro, 2000) bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*); (2) meningkatnya rasa

harga diri (*self esteem*) masyarakat sebagai manusia; dan (3) meningkatnya kemauan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*). Pembangunan ekonomi daerah dan nasional sedang dan akan menghadapi perubahan fundamental yang berlangsung sangat cepat dan perlu kesiapan terutama pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Usaha kecil dan menengah atau *Small and Medium Enterprise* (SME) secara umum memiliki karakteristik yang hampir sama antara satu negara dengan negara lain, namun dari segi patokan/ standar ukuran berada antara satu negara dengan negara lain, seperti: aset maksimal, omset usaha, permodalan, jumlah tenaga kerja, gaya manajemen yang dilaksanakan, dan sebagainya. Meskipun kriteria umum UMKM hampir sama antara satu negara dengan negara lain tetapi karena kondisi eksternal maupun internal perusahaan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain maka ukuran UMKM tidak dapat digeneralisasi. Peranan UMKM sangat besar dalam Perekonomian Nasional (Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, 2004) antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong munculnya kewirausahaan domestik dan sekaligus menghemat sumberdaya negara.
2. Menggunakan teknologi padat karya, sehingga dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan yang disediakan oleh perusahaan skala besar.
3. Dapat didirikan, dioperasikan dan memberikan hasil dengan cepat.
4. Pengembangannya dapat mendorong proses desentralisasi inter-regional dan intra-regional, karena usaha kecil dapat berlokasi di kota-kota kecil dan pedesaan.
5. Memungkinkan tercapainya obyektif ekonomi dan sosial-politik dalam arti luas.

Pentingnya UMKM dalam perekonomian nasional akan meningkatkan komitmen dan pemihakannya dalam pembangunan nasional. Hal ini didukung oleh pranata konstitusi dan aturan pelaksanaannya (GBHN, UU Usaha Kecil, UU Perkoperasian, dan UU Propenas) yang memberikan prioritas pembangunan ekonomi pada UMKM dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Setiap usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dan beragam sumber daya yang ada harus mampu menaksir sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Di samping itu, otonomi daerah yang diharapkan mampu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata.

Sejumlah daerah telah mengidentifikasi peraturan-peraturan yang menghambat sekaligus berusaha mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dan bahkan telah meningkatkan pelayanan kepada UMKM dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap. Namun masih terdapat daerah lain yang memandang UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru bagi UMKM sehingga biaya usaha UMKM meningkat.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ke depan serta mengurangi pengangguran dan sekaligus untuk mampu bersaing dalam pasar global dan dinamika perubahan situasi dalam negeri, maka pengembangan UMKM perlu mempertimbangkan aspek potensial yang ada, yaitu (Sopanah, 2013) : (a) seyogyanya mulai meningkatkan pengembangan UMKM untuk lebih proporsional menerapkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi; (b) UMKM di sektor agribisnis dan agroindustri, karena prospeknya yang sangat menarik, perlu didukung oleh meningkatnya kemudahan dalam pengelolaan usaha, seperti status kepemilikan tanah, ketersediaan bahan baku (jumlah dan kualitas), teknologi, informasi pasar dan SDM serta oleh berkembangnya wadah organisasi usaha bersama yang sesuai dengan kebutuhan dan efisien, seperti antara lain asosiasi produsen dan koperasi; (c) sumber permodalan UMKM harus semakin berkembang dengan meluasnya akses terhadap sumber permodalan yang memiliki kapasitas dukungan lebih besar seperti perbankan; (d) pengembangan usaha menengah yang kuat merupakan pilihan strategis yang dapat diandalkan untuk mendukung proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM. Peran, ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan industri besar nasional terhadap impor input antara; (e) penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha dan penyediaan insentif bagi usaha informal, khususnya yang berskala mikro, diprioritaskan dalam rangka perlindungan, kesetaraan berusaha dan kontinuitas peningkatan pendapatan; dan (f) pengintegrasian pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional. Tujuannya selain untuk menyesuaikan dengan karakteristik pengusaha dan jenis usaha di setiap daerah dan setiap sektor usaha, juga untuk memperluas kegiatan ekonomi yang lebih merata.

D. Teori Pengembangan Wilayah

Teori pertumbuhan wilayah merupakan teori pertumbuhan ekonomi nasional yang disesuaikan pada skala wilayah dengan anggapan dasar bahwa suatu wilayah adalah mini nation (Tommy Firman, 1985). Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi wilayah dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada sifat keterbukaan dalam proses input output

barang dan jasa maupun orang. Dalam sistem wilayah keluar masuk orang atau barang dan jasa relatif bersifat terbuka, sedangkan pada skala nasional bersifat lebih tertutup (*closed region*). Menurut John Glasson (1977) pertumbuhan wilayah dapat terjadi sebagai akibat dari penentu endogen atau eksogen, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam wilayah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar wilayah, atau kombinasi dari keduanya. Dalam model-model ekonomi makro disebutkan bahwa ekonomi penentu intern pertumbuhan wilayah adalah modal, tenaga kerja, tanah (sumberdaya alam), dan sistem sosio-politik, sedangkan menurut model ekspor pertumbuhan, industri ekspor dan kenaikan permintaan adalah penentu pokok pertumbuhan wilayah yang bersifat ekstern.

E. Teori Basis Ekonomi

Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*) adalah salah satu teori atau pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Ide pokoknya adalah bahwa beberapa aktivitas ekonomi di dalam suatu wilayah secara khusus merupakan aktivitas basis ekonomi, yaitu dalam arti pertumbuhannya memimpin dan menentukan perkembangan wilayah secara keseluruhan, sementara aktivitas lainnya yang non basis adalah secara sederhana merupakan konsekuensi dari keseluruhan perkembangan wilayah tersebut. Dengan demikian perekonomian wilayah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu aktivitas basis dan aktivitas bukan basis atau non basis. Glasson (1978) menyatakan bahwa aktivitas basis adalah aktivitas yang mengeksport barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian wilayah yang bersangkutan, atau yang memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan aktivitas non basis adalah aktivitas yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian yang bersangkutan ruang lingkup produksi dan daerah pasar sektor non basis terutama adalah wilayah yang bersangkutan atau bersifat lokal .

F. Peranan Sektor Industri dalam Pengembangan Wilayah

Peranan industri dalam pertumbuhan wilayah secara jelas dikemukakan oleh Yeates dan Gardner (Arifin, 1997), bahwa kegiatan industri merupakan salah satu faktor penting dalam mekanisme perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Hal ini disebabkan adanya efek multiplier dan inovasi yang ditimbulkan oleh kegiatan industri yang berinteraksi dengan potensi dan kendala yang dimiliki wilayah. Seorang pakar ekonomi Rusia (Rostow), juga mengatakan bahwa tahap tinggal landas dalam pembangunan ekonomi ditandai oleh pertumbuhan yang pesat pada satu atau beberapa sektor industri (Rostow dalam Jhingan, 1990). Hubungan antara industri dan wilayah adalah bervariasi

antar berbagai wilayah. *Pertama* yaitu adanya keterkaitan dengan lingkungan, meningkatkan kesempatan kerja, kebutuhan akan bahan baku, sumberdaya alam dan manusia, serta perbandingan keuntungan nasional dan internasional dalam penggunaannya pada berbagai industri. *Kedua*, dalam kaitannya dengan industri sendiri yang meliputi :

1. Kepentingan industri dan fungsi yang berkaitan dengan berbagai elemen ekonomi wilayah, seperti jenis pekerjaan, kesempatan kerja, pendapatan rumah tangga, penggandaan antar sektor, pendapatan sektor ekspor dan penggunaan lahan dari berbagai kegiatan ekonomi.
2. Organisasi sistem dalam arti kepemilikan, pengendalian, skala ekonomi, teknologi, kapitalisasi dan keterkaitan antara organisasi.
3. Dinamika sistem, terlihat dari adanya pertumbuhan, perkembangan, stagnasi, kemunduran dan stagnasi, kemunduran dan restrukturisasi yang dihasilkan dari kombinasi kelahiran, migrasi masuk, migrasi keluar atau perubahan lain terhadap kondisi perusahaan yang ada.
4. Tipe industri seperti terlihat pada sektor ekonomi fungsi industri dalam mata rantai produksi, serta tempatnya dalam, divisi tenaga kerja baik secara nasional maupun internasional

Ketiga, adanya dampak dari sistem industri dan dinamikanya terhadap kualitas ekonomi, sosial, fisik dan komponen terbangun dari lingkungan masyarakat, khususnya kondisi pasar tenaga kerja, pendapatan riil, kesejahteraan, dan sejenisnya. Untuk dapat mengatasi persoalan yang akan ditimbulkan oleh pembangunan industri, pemerintah daerah perlu mengetahui gambaran menyeluruh mengenai industri itu sendiri serta dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan.

G. Strategi Pengembangan Sektor Industri

Tambunan (2000) mengemukakan bahwa untuk mengurangi ketergantungan pembangunan industri di negara berkembang terhadap negara maju dapat ditempuh strategi industri pengganti impor yang disertai dengan politik proteksi. Ditempuhnya strategi pengganti impor tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa : (1) sumber-sumber ekonomi relatif tersedia di dalam negeri, (2) respon permintaan barang-barang industri dari negara maju masih rendah, (3) mengurangi akibat-akibat ketidakstabilan pasar internasional terhadap pasar di dalam negeri, (4) mendorong industri di dalam negeri supaya lebih berkembang, (5) adanya potensi permintaan di dalam negeri yang memadai, membuka kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah dan menghemat devisa, (7) mempercepat proses pengalihan teknologi, (8) oleh karena strategi tersebut akan diikuti

dengan proteksi yang tinggi, sedangkan potensi permintaan dalam negeri cukup luas, maka lebih menarik investasi dari dalam dan luar negeri.

Selain itu menurut Zain (1986) dalam Sahara (1999) strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan industri dimasa yang akan datang adalah :

1. Keunggulan komparatif, yaitu dilihat dari sumber daya alam yang tersedia di Indonesia
2. Keterkaitan antar sektor terutama sektor hulu hilir. Dari strategi kedua ini diharapkan timbul suatu ketekaitan dimana pertumbuhan yang terjadi pada sektor industri pemakai akan ikut menumbuhkan industri komponen. Efek selanjutnya adalah terciptanya penghematan devisa, meningkatkan pendapatan, keahlian dan kesempatan kerja.
3. Teknologi yang tinggi dan selalu berkembang untuk pembangunan industri hulu secara simultan. Faktor untuk industri hulu harus merupakan pertimbangan yang dominan karena apabila industri hulu menggunakan teknologi yang tinggi dan efisien maka industri hilirnya tidak akan mengalami biaya yang tinggi dan ini sesuai dengan sasaran untuk mengembangkan industri yang kompetitif untuk ekspor.

H. Strategi Pengembangan Sektor UMKM

Pengembangan dunia usaha khususnya industri kecil merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena dapat memberdayakan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan peluang lapangan kerja, daya tahan industri kecil merupakan cara terbaik untuk mengembangkan perekonomian daerah yang sehat. Selanjutnya Suryana, 2000, menyatakan bahwa, pertumbuhan industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga menghasilkan ekspor. Dalam kaitannya dengan pengembangan usaha kecil dapat dilihat dari teori basis. Menurut Glasson (1990) basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor, yaitu:

- a. Sektor basis adalah sektor yang mengekspor barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masuk dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

- b. Sektor bukan basis yaitu sektor yang menjadikan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Suryana (2001) bahwa Teori Dinamik dan Teori *Resource-Based Strategy* sesuai jika diterapkan pada pengembangan UMKM di Indonesia. Model dasar *resource-based strategy* adalah strategi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya internal yang superior (potensial) untuk menciptakan kemampuan inti (keunggulan) dalam menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Akibatnya, keberadaan UMKM tidak tergantung pada strategi kekuatan pasar melalui monopoli dan fasilitas pemerintah. Dalam strategi ini, UMKM mengarah pada keahlian khusus secara internal yang bisa menciptakan produk inti yang unggul untuk memperbesar pangsa pasar manufaktur. Teori tersebut dapat memanfaatkan sumber daya lokal. UMKM termasuk industri kecil mampu berkembang bukan karena fasilitas dari pemerintah melainkan karena kreativitasnya.

Dalam prakteknya, para pelaku UMKM cenderung menggunakan model perilaku pasar yang bersifat *non-price competition* melalui pengembangan pola dan desain produk unggulan baru yang lebih inovatif dan sulit ditiru dari pada model persaingan harga. Kluster industri termasuk UMKM mengidentifikasi bahwa jenis baru daerah industri telah muncul. Teori ini dikenal *New Industrial District (NID)*. Dalam Teori daerah industri tradisional mengabaikan kerja sama antara Industri Besar Dan Menengah (IBM) dengan Industri Kecil Kerajinan Rumah Tangga (IKRT). Teori ini menilai kisah sukses kluster IKRT (UMKM) terlalu tinggi, dan menilai terlalu rendah kekuatan perusahaan besar, serta gagal dalam membedakan tahap-tahap industrialisasi awal dan lanjut (Kuncoro, 2007). Ada tiga jenis *industrial district*, menurut Kuncoro, (2007) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kawasan industri yang terspesialisasi (*specialized industrial district*). Sesuai dengan garis teori tersebut, selanjutnya kluster yang terspesialisasi merupakan konsentrasi geografis subsektor manufaktur yang sama. Model ini cocok untuk kluster industri di Italia.
- b. Daerah industri diturunkan dari model kompleks industri yang muncul dari Teori klasik dan neoklasik. Ciri utama dalam model ini adalah ada sekumpulan hubungan yang dapat diidentifikasi dan stabil, serta meminimasi biaya transaksi dan biaya spasial. Model ini dikembangkan di Amerika dan Jepang.

- b. Model jaringan sosial (*social network model*). Model ini dikembangkan literatur sosiologis dan neo institusionalis. Kluster ini hanya menggambarkan respon ekonomi terhadap peluang yang tersedia dan melengkapinya, tetapi tingkat kelekatan dan integrasi sosial yang tidak biasa. Karena adanya bentuk modal sosial, yang dihasilkan dan dilestarikan melalui kombinasi sejarah sosial dan tindakan bersama yang menerus, merupakan faktor kunci, selanjutnya kluster ini sering disebut kluster dewasa.

Teori *Industrial District* lebih menonjolkan pada daerah-daerah industri di Eropa dan Amerika. Teori ini telah mengalami evolusi yang cukup lama dan berakar dalam konteks tradisional, institusional, serta kultural bukan didirikan melalui intervensi pemerintah. Teori *industrial district* tersebut memiliki daya penjelas yang lebih baik dalam menganalisis kluster UMKM dibandingkan dengan model Teori *New Economic Geography* (NEG). Karena dalam Teori NEG, sebenarnya mengabaikan peran dan keberadaan industri kecil rumah tangga (IKRT) dalam kluster industri secara regional, sehingga ciri-ciri dan peran dari UMKM menjadi kurang diperhatikan.

Pada era otonomi daerah paradigma dalam pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari kemajuan fisik yang diperoleh atau berapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima. Keberhasilan pembangunan harus dapat diukur dengan parameter yang lebih luas dan lebih strategis yang meliputi semua aspek kehidupan baik materiil maupun non materiil. Agar dapat memenuhi kriteria luas dan strategi tersebut, maka pelaksanaannya harus diawali berdasarkan prioritas dan pemilihan sasaran-sasaran yang mempunyai nilai strategis dan memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan citra Kabupaten Lebak dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah, pembangunan ekonomi wilayah hingga saat ini masih menghadapi masalah, diantaranya adalah keterbelakangan ekonomi. Upaya masyarakat dalam memanfaatkan atau mengelola sumber daya belum berhasil sepenuhnya, hal ini disebabkan karena sebagian penduduk masih terbelakang secara ekonomi, artinya kualitas penduduk adalah rendah yang tercermin dalam produktivitas yang rendah. Padahal tingkat produktivitas berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan. Sektor ekonomi unggulan pada dasarnya adalah motor penggerak perekonomian di suatu wilayah. Melalui sektor ekonomi unggulan, suatu wilayah secara tidak langsung menggantungkan diri pada kontribusi hasil penjualan dari sektor ekonomi unggulan tersebut bagi pembentukan PDRB wilayahnya digunakan sebagai salah satu sarana

pelaksanaan pembangunan daerah. Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat bahkan pendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2001). Sebelum sebuah strategi pengembangan disusun sebaiknya diketahui dahulu kekuatan dan kelemahan daerah. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan tersebut akan lebih tepat dalam menyusun strategi guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan diketahuinya tujuan dan sasaran maka strategi pengembangan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi siapa saja yang melaksanakan usaha di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam mempersiapkan strategi ada langkah-langkah yang dapat ditempuh:

- a. Mengidentifikasi sektor-sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor.
- b. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor penyebabnya.
- c. Mengidentifikasi sumber daya yang siap digunakan untuk mendukung pengembangan
- d. Dengan menggunakan pembobotan terhadap variabel kekuatan dan kelemahan maka akan ditemukan potensi yang menjadi unggulan dan patut dikembangkan.
- e. Menentukan strategi untuk mengembangkan sektor yang dapat menarik sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian dapat berkembang.

I. Pembangunan Sektor Industri dengan Kesempatan Kerja

Ada hubungan antara aktivitas pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang mana hal ini terlihat bila terdapat pertumbuhan ekonomi maka mengakibatkan meningkatnya aktivitas kegiatan ekonomi, demikian sebaliknya. Dengan adanya kegiatan ekonomi yang meningkat akan membuka lapangan kerja dan menambah kesempatan kerja. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi juga akan mengakibatkan transisi penduduk berupa memungkinkan terjadinya transisi antara pengusaha dan pemilik tenaga kerja. Besar kecilnya transisi ini tergantung dari kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Variabel penentu dari kualitas tenaga kerja ialah : pendidikan, kesehatan dan perilaku, yakni pandangan dan sikap ditempat kerja yang biasa juga disebut budaya kerja. Mengenai kualitas tenaga kerja meliputi komposisi tenaga kerja dan lapangan kerja, seperti sektor pertanian, industri dan jasa. Pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi pergeseran jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh tingkat pendidikan, usia pensiun, jam kerja dan sebagainya.

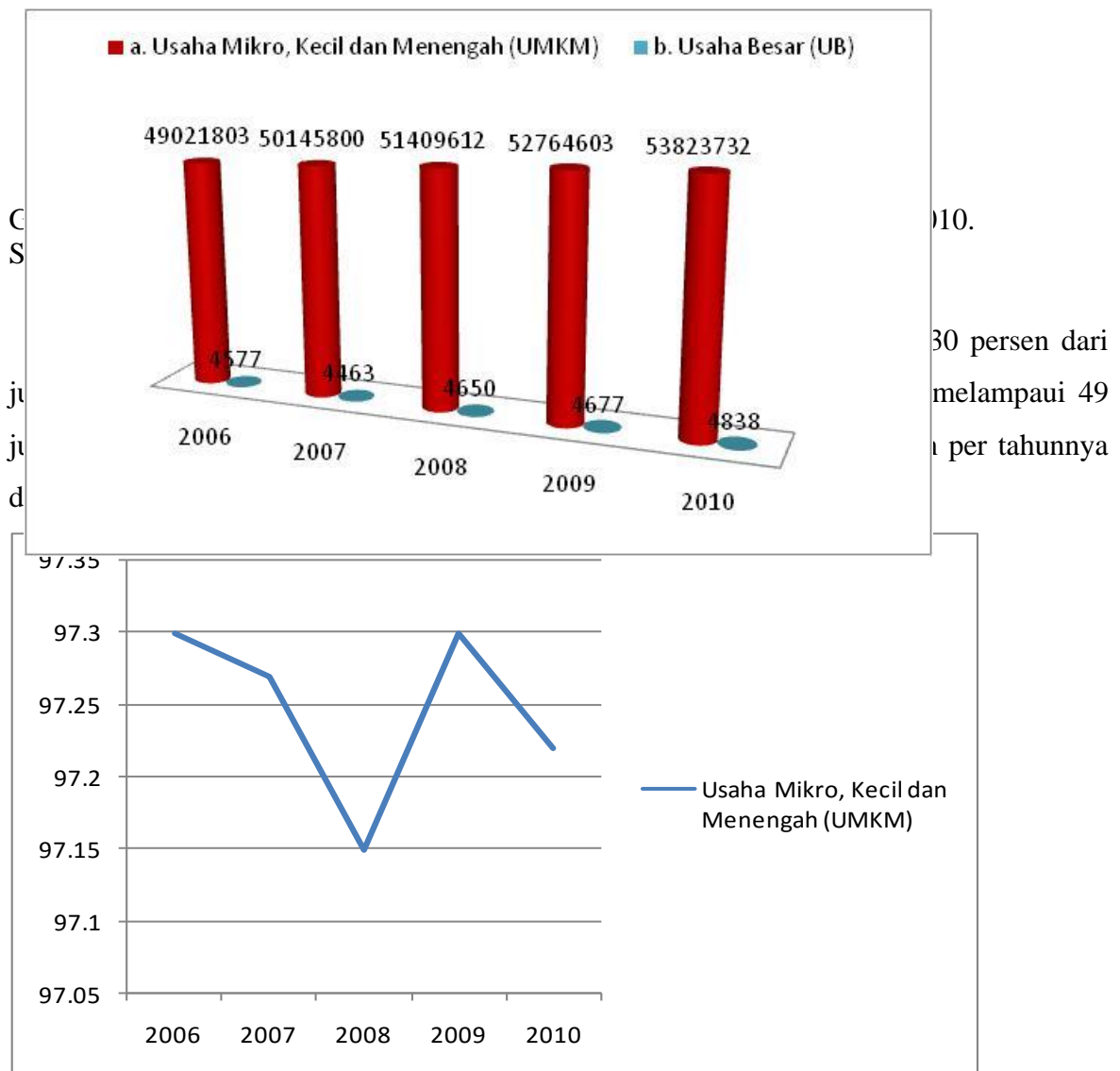
Sepanjang waktu, proses tersebut semakin memperburuk disparitas regional pada suatu negara hingga mekanisme kerja mulai beroperasi dalam arah berlawanan, misalnya melalui: (1) penciptaan pekerjaan baru pada wilayah kurang berkembang yang menurunkan atau menghentikan emigrasi ke wilayah lebih kaya; (2) menurunnya daya tarik wilayah lebih maju karena kejenuhan pasar dan kepadatan fisik yang selanjutnya meningkatkan sewa tanah dan menurunkan tingkat profit rata-rata; (3) pertumbuhan investasi publik pada wilayah lemah yang mempunyai efek ganda yaitu lahirnya sistem produksi lokal yang memerlukan lebih banyak investasi dalam kapital sosial dan tumbuhnya investasi privat pada wilayah lemah; dan (4) munculnya efek penuh pengaruh wilayah kuat ke wilayah lemah.

J. Kondisi Umum UMKM Di Indonesia Saat Ini

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi (Bappenas, 2006): (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UMKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

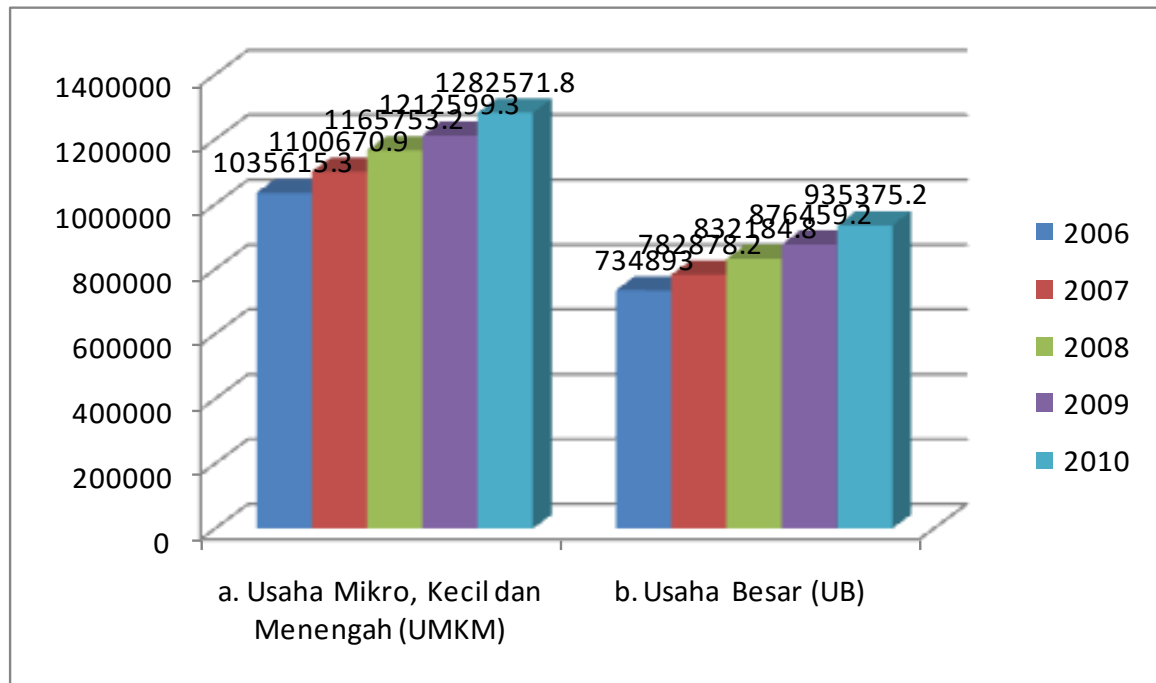
Perkembangan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja. Pada tahun 2006 - 2010, persentase jumlah UMKM sebesar 99,9 persen dari seluruh unit usaha. Dan persentase perkembangan jumlah unit usaha UMKM tahun 2006-2010 sebesar 9,68 persen atau 4.695.062 unit untuk Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK) yang terdiri 100.999 unit usaha atau 21,37 persen

dan jumlah usaha menengah sebanyak 5.868 unit usaha atau 15,96 persen. Sedangkan perkembangan dari Usaha Besar periode 2006-2010 hanya sebesar 5,69 persen. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 2.1. berikut:



Gambar 2.2. Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Tahun 2006-2010
 Sumber : Departemen Koperasi (www.dekop.go.id)

Kontribusi UMKM dalam PDB atas dasar harga konstan pada tahun 2007 adalah sebesar 58,44 persen dari total PDB nasional. Kemudian tahun 2008 menjadi 58,35 persen, dan pada akhir tahun 2010 menjadi 57,83 pesen. Jika dilihat *trend* kontribusi UMKM dalam PDB memang mengalami penurunan, akan tetapi jumlahnya masih dominan.



Gambar 2.3. Kontribusi UMKM terhadap PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006-2010

Sumber : Departemen Koperasi (www.dekop.go.id)

Berbagai hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM, antara lain ditunjukkan oleh tersusunnya berbagai rancangan peraturan perundangan, antara lain RUU tentang penjaminan kredit UMKM dan RUU tentang subkontrak, RUU tentang perkreditan perbankan bagi UMKM, RPP tentang KSP, tersusunnya konsep pembentukan biro informasi kredit Indonesia, berkembangnya pelaksanaan unit pelayanan satu atap di berbagai kabupaten/kota dan terbentuknya forum lintas pelaku pemberdayaan UMKM di daerah, terselenggaranya bantuan sertifikasi hak atas tanah kepada lebih dari 40 ribu pengusaha mikro dan kecil di 24 propinsi, berkembangnya jaringan layanan pengembangan usaha oleh BDS providers di daerah disertai terbentuknya asosiasi BDS providers Indonesia, meningkatnya kemampuan permodalan sekitar 1.500 unit KSP/USP di 416 kabupaten/kota termasuk KSP di sektor agribisnis, terbentuknya pusat promosi produk koperasi dan UMKM, serta dikembangkannya sistem insentif pengembangan UMKM berorientasi ekspor dan berbasis teknologi di bidang agroindustri (Bappenas, 2006). Hasil-hasil tersebut, telah mendorong peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap perluasan penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan peningkatan pendapatan.

K. Permasalahan Yang Dihadapi UMKM

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain meliputi (Mohammad, 2004):

a. Faktor Internal

1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UMKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UMKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya.

3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.

4. Mentalitas Pengusaha UMKM

Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UMKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UMKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko. Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UMKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja.

b. Faktor Eksternal

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan Produk Domestik Brutto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi). Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang

seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UMKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

3. Pungutan Liar

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UMKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

4. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

5. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas

6. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang pendek.

Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UMKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

7. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

8. Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UMKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UMKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UMKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UMKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan langkah-langkah yang selama ini telah ditempuh, maka kedepannya, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut (Tambunan, 2003):

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk UMKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sampai saat ini, BRI memiliki sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UMKM. Untuk itu perlu mendorong pengembangan LKM agar dapat berjalan dengan baik,

karena selama ini LKM non koperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.

3. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).

4. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM.

7. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8. Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang

dihasilkan. Disamping itu, perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

9. Mengembangkan Kerjasama yang Setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UMKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

10. Mengembangkan Sarana dan Prasarana

Perlu adanya pengalokasian tempat usaha bagi UMKM di tempat-tempat yang strategis sehingga dapat menambah potensi berkembang bagi UMKM tersebut.

Berbagai permasalahan mikro yang terdapat pada kebanyakan UMKM, dapat menghambat UMKM untuk dapat berkembang dengan baik, terutama dalam mengoptimalkan peluang yang ada. Hasil penelitian kerjasama Kementerian KUMKM dengan BPS (2003) menginformasikan bahwa jenis layanan yang paling banyak diharapkan dari lembaga pelayanan bisnis (LPB) atau *Business Development Services Provider* (BDSP) adalah: fasilitasi permodalan, fasilitasi perluasan pemasaran, fasilitasi jasa informasi, fasilitasi pengembangan desain produk, organisasi dan manajemen, fasilitasi penyusunan proposal pengembangan usaha, fasilitasi pengembangan teknologi.

Strategi yang diterapkan dalam upaya mengembangkan UMKM di masa depan terlebih dalam menghadapi pasar bebas di tingkat regional dan global, sebaiknya memperhatikan kekuatan dan tantangan yang ada, serta mengacu pada beberapa hal sebagai berikut (Sulaeman, 2004):

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan UMKM secara sistemik, mandiri dan berkelanjutan
- b. Mempermudah perijinan, pajak dan retribusi lainnya,
- c. Mempermudah akses pada bahan baku, teknologi dan informasi
- d. Menyediakan bantuan teknis (pelatihan, penelitian) dan pendampingan dan manajemen (SDM, keuangan dan pemasaran).
- e. Secara rutin melakukan pertemuan, lokakarya model pelayanan bisnis yang baik dan tepat
- f. Mendorong UMKM untuk masing masing memiliki keahlian khusus.

- g. Menciptakan sistem penjaminan kredit (*financial guarantee system*) yang terutama disponsori oleh pemerintah pusat dan daerah
- h. Secara bertahap dan berkelanjutan mentransformasi sentra bisnis (parsial) menjadi kluster bisnis (sistemik).

L. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Gofur Ahmad (2004) terhadap UMKM yang berusaha di bidang pengrajin garmen yang berlokasi di Sentra Warung Buncit, diantaranya menyebutkan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan oleh pengrajin adalah adanya bantuan modal berupa kredit lunak, agar mereka dapat mengembangkan usaha mereka di bidang garmen.

Rusdarti (2010), menghasilkan bahwa kecenderungan fenomena industri kecil (UMKM) di Kota Semarang pada industri pengolahan. Industri kecil mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan peluang kerja yang jumlahnya relatif besar dan memberdayakan masyarakat dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Sektor potensial yang dapat menjadi sektor penggerak adalah industri pengolahan, dalam kaitan dengan industri kecil (UMKM) adalah jenis industri makanan dan minuman, kemudian obat-obatan tradisional. Industri pengolahan merupakan sektor basis dan penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi.

Susilo et al., (2008) melakukan kajian masalah dan kinerja industri kecil di Kabupaten Bantul Provinsi DIY. Survei dilakukan terhadap 100 pengusaha yang tergolong industri skala kecil dan menengah (IKM). Hasil kajian tersebut menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh pengusaha adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial terhadap pihak lain dan keterbatasan untuk menambah modal. Masalah lain yang dihadapi adalah menurunnya hasil produksi dan pemasaran hasil produksi. Dengan indikator kinerja tingkat produksi maka sebagian besar unit usaha (65%) mengalami penurunan, sedangkan 23% produksinya tetap, dan sebanyak 12% mengalami peningkatan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa para pengusaha pada skala IKM memiliki kerentanan yang tinggi terhadap berbagai sumber guncangan. Adanya bencana gempa bumi berdampak cukup besar terhadap kemampuan finansial perusahaan.

Tarigan dan Susilo (2008) melakukan kajian masalah dan kinerja industri kecil pada industri kerajinan perak di Kota Yogyakarta. Dari hasil kajian tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa, pengusaha/pengrajin perak menghadapi permasalahan yang terkait dengan terganggunya kegiatan produksi karena adanya kerusakan bangunan serta

prasarana produksi, terganggunya proses produksi menyebabkan berkurangnya jumlah produksi yang berimplikasi pada kemampuan melayani permintaan, dan penurunan permintaan pada gilirannya akan mengurangi pendapatan dan berimplikasi pada kemampuan memenuhi kewajiban finansial.

Dalam hal perbedaan masalah yang dihadapi tergantung dari jenis dan karakteristik industri kecil. Ada yang menyatakan masalah pokok yang dihadapi adalah kemampuan bersaing di pasar, pemasaran produk, dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Dalam hal dinamika usaha, persamaan diantara mereka terutama dalam diversifikasi produk. Pengusaha industri kecil melakukan diversifikasi dari sisi bahan baku dan hasil produksi. Perbedaan dinamika usaha terjadi dalam hal diversifikasi usaha. Pengusaha industri kecil melakukan diversifikasi usaha yang berbeda sama sekali dengan usaha sebelumnya, namun juga ada yang melakukan diversifikasi usaha yang terkait dengan usaha sebelumnya (Ali dan Swiercz, 1991).

Susilo dan Krisnadewara (2007) menyatakan bahwa, berdasarkan hasil riset yang mereka lakukan tentang strategi bertahan industri pasca gempa di Yogyakarta, strategi yang bisa diterapkan untuk pengembang UMKM adalah berproduksi dengan fasilitas / peralatan terbatas, berproduksi dengan jumlah bahan baku terbatas, berproduksi dengan jumlah tenaga kerja terbatas, berproduksi dengan modal finansial terbatas, membuka *show-room/outlet*, melakukan usaha sampingan. Rekomendasi dari hasil kajian in berkaitan dengan upaya percepatan pemulihan kembali untuk berusaha adalah dengan melakukan kegiatan produksi kembali yang menekankan pada tambahan modal. Dengan tambahan modal maka berbagai keterbatasan dalam kegiatan produksi dapat diatasi, sehingga kegiatan produksi akan lebih lancar sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Menurut Priyono (2004), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari

hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, juga merupakan tanggung jawab masyarakat, terutama mereka yang telah lebih maju, karena telah terlebih dahulu memperoleh kesempatan bahkan mungkin memperoleh fasilitas yang tidak diperoleh kelompok masyarakat lain.

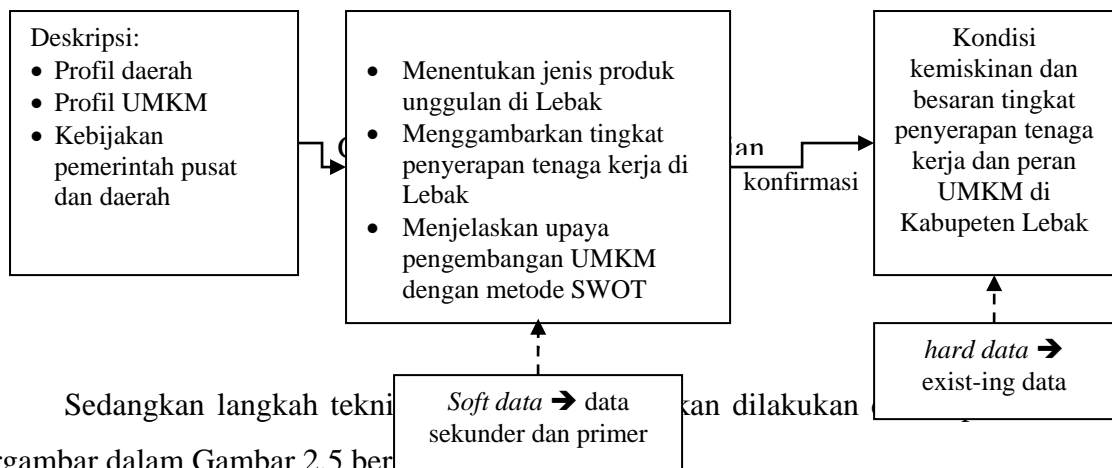
Studi yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) seperti dikemukakan dalam Sethuraman (1993), dijelaskan bahwa aktivitas-aktivitas UMKM tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi yang antara lain ditandai dengan: mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumberdaya lokal, usaha milik sendiri, opersinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, ketrampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal, dan tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif. Studi yang dilakukan ILO ini menyebutkan sektor UMKM punya ciri: ukuran usaha kecil, kepemilikan keluarga, intensif tenaga kerja, status usaha individu, tanpa promosi, dan tidak ada hambatan masuk.

Menurut Chris Manning, dkk (1991) sektor UMKM adalah bagian dari sistem ekonomi kota dan desa yang belum mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah atau

belum mampu menggunakan bantuan yang telah disediakan atau telah menerima bantuan tetapi belum sanggup dikembangkan. Sektor UMKM di Indonesia, umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia, tidak mempunyai izin usaha, pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja, pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini. Pada umumnya UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menghambat kegiatan usahanya. Berbagai hambatan tersebut meliputi kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM berkualitas, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi, infrastruktur pendukung dan rendahnya komitmen pemerintah.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka secara ringkas kerangka dan tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:



TAHAP	TINGKAT	METODE	OUTPUT
Penentuan jenis produk dan komoditas unggulan UMKM	→ Kabupaten	→ Analisis LQ (<i>Location Quation</i>)	→ Jenis potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis dan mana yang bukan sektor basis
↓ Menggambarkan tingkat penyerapan tenaga kerja	→ Kabupaten	→ Analisis deskriptif	→ Penggambaran tingkat penyerapan tenaga kerja
↓ Penentuan jenis	→ Kabupaten	→ SWOT	→ Deskripsi bentuk

upaya dan kebijakan pemerintah			kebijakan pemerintah
--------------------------------------	--	--	----------------------

Gambar 2.5. Langkah Teknis Tahapan Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Lebak. Pemilihan lokasi penelitian untuk mengetahui jenis dan produk yang potensial dikembangkan oleh UMKM yang ada di Kabupaten Lebak.

B. Data Dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua tipe yaitu:

- a. Data sekunder terdiri dari data PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2000-2011, data jumlah UMKM, data potensi wilayah Kabupaten Lebak, Data

RPJMD/RPJPD Kabupaten Lebak. Data-data tersebut diperoleh dari BPS Banten, BPS Pusat, Departemen Koperasi, Bappeda Kabupaten Lebak.

- b. Data primer terdiri dari potret bentuk UMKM di Kabupaten Lebak.

C. Kerangka Analisis Penelitian

Substansi penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan penelitian mengenai permasalahan potensi ekonomi daerah dalam pengembangan umkm unggulan di Kabupaten Lebak. Dalam penelitian ini, isu potensi unggulan menjadi dasar utama. Kondisi nyata yang terjadi dalam pengembangan UMKM dengan segala permasalahan yang dihadapi bermuara pada masalah seperti jenis potensi unggulan dan strategi yang diambil, masalah permodalan, dan kualitas sumber daya manusianya. Sektor UMKM merupakan sektor yang bisa bertahan dalam krisis yang menyerang Indonesia pada tahun 1997/1998. Dan sektor UMKM juga merupakan penyerap jumlah tenaga kerja yang sangat besar dan mampu menjadi sektor penyumbang bagi APBN Indonesia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder mengenai tingkat PDRB Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten tahun 2005-2011, yang digunakan untuk menganalisis tingkat indeks LQ dari Kabupaten Lebak. Selain data mengenai tingkat PDRB, juga dipergunakan data jumlah pencari kerja, komposisi penduduk bekerja, bukan angkatan kerja, dan pengangguran. Juga dipergunakan data mengenai perkembangan Upah Minimum Kota (UMK) dari Kabupaten Lebak, dan data penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM. Dari hasil analisis Indeks LQ, akan diketahui sektor ekonomi apa sajakah yang menjadi sektor komoditi unggulan dari Kabupaten Lebak. Tujuan dari perlu diketahuinya sektor unggulan ini adalah untuk dijadikan dasar bagi UMKM yang akan mengembangkan usahanya dan potensi yang menonjol dan merupakan inti dasar dari permasalahan mengenai UMKM di Kabupaten Lebak. Permasalahan pertama yang ditinjau dalam penelitian ini adalah jenis produk dan komoditas UMKM apakah yang potensial dan perlu untuk dikembangkan di Kabupaten Lebak. Untuk mengetahui komoditas potensial yang perlu dikembangkan dilakukan analisis *Location Quotient* (LQ). Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisis deskriptif mengenai tingkat penyerapan tenaga kerja dan jumlah lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Lebak, serta penyerapan tenaga kerja oleh sektor UMKM. Dari hasil pengolahan ini akan terlihat seberapa besar pengaruh UMKM dalam perekonomian Kabupaten Lebak.

Hasil dari dua analisis tersebut dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan dan strategi untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Lebak. Kebijakan dan

strategi ini ini dalam bentuk program pemerintah melalui Departemen Koperasi dan instansi yang bersangkutan serta hasil dari analisis SWOT. Dalam langkah ini, akan dievaluasi program yang diambil dalam usaha mengembangkan UMKM, sehingga diharapkan pemerintah mampu membuat suatu kebijakan yang mendukung kemajuan usaha UMKM .Sedangkan untuk melihat matriks analisis dalam penelitian ini bisa dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Matriks Analisis Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Analisis	Sumber Data	Keluaran
1	Menganalisis jenis produk dan komoditas UMKM apakah yang potensial dan perlu untuk dikembangkan di Kabupaten Lebak	Analisis LQ	PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2000-2011, data jumlah UMKM, data potensi wilayah Kabupaten Lebak, Data RPJMD/RPJPD Kabupaten Lebak Sumber : BPS Banten, BPS Pusat, Departemen Koperasi, Bappeda Kabupaten Lebak	Jenis usaha potensial
2	Menganalisis tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Lebak	Analisis Deskriptif	Data RPJMD/RPJPD Kabupaten Lebak Sumber : BPS Banten, BPS Pusat, Departemen Koperasi, Bappeda Kabupaten Lebak	Bentuk tingkat penyerapan tenaga kerja sektor UMKM
3	Menganalisis upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan jenis UMKM dan produk unggulan tersebut	Analisis SWOT	Data RPJMD/RPJPD Kabupaten Lebak Sumber : BPS Banten, BPS Pusat, Departemen Koperasi, Bappeda Kabupaten Lebak	Bentuk kekuatan (<i>Strength</i>) dan kelemahan (<i>Weakness</i>). peluang (<i>Opportunity</i>) dan tantangan (<i>Threat</i>) dari UMKM

1. Model dan Alat Analisis

a. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan sebagai dasar penentuan strategi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh

UMKM. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja (Rangkuti, 1997). Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threath*).

1. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT

SWOT merupakan singkatan dari *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang) dan *threats* (ancaman). Pendekatan ini mencoba menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi.

Tabel 3.2. Matriks Analisis SWOT

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITY (O)	TREATHS (T)
STREANGTH (S)	Comparative Advantage (SO)	Mobilization (ST)
WEAKNESS (W)	Divestment/Investment (WO)	Damage Control (WT)

Sumber: Rangkuti (2007)

Keterangan:

- **Sel A: *Comparative Advantages***

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.

- **Sel B: *Mobilization***

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.

- **Sel C: *Divestment/Investment***

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk

dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).

• **Sel D: *Damage Control***

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

Tabel 3.3. Matriks Analisis SWOT Penelitian

	<p><i>STRENGTH (S)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Letak Kabupaten Lebak strategis - Sarana dan prasarana yang memadai - Komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan dalam proses pembangunan daerah - Penduduk dalam jumlah besar sebagai sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan daerah 	<p><i>WEAKNESS (W)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana yang terpusat pada wilayah tertentu - Perkembangan sektor jasa dan perdagangan yang menekan sector industry - Kesenjangan yang lebar antar penduduk
<p><i>OPPORTUNITIES (O)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya minat investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Lebak berpotensi berkembangnya kawasan industri sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat • Dibukanya AFTA membuka peluang ekspor dan peningkatan daya saing produk lokal • Terbukanya iklim 	<p>Strategi SO</p> <p>Mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk meningkatkan peran dan manfaat keberadaan UMKM</p>	<p>Strategi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan sumber daya yang ada • Pemerataan pembangunan

usaha dapat mendorong peningkatan lapangan kerja sektor informal		
<p>THREATS (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dampak globalisasi menimbulkan penurunan nilai-nilai moral masyarakat - Adanya kompetisi antara daerah baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan pusat bisnis berpengaruh terhadap minat investor - Adanya wacana dan rencana pemekaran kabupaten/ kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Lebak 	<p>Strategi ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas sumber daya. • Meningkatkan kualitas produk yang berdaya saing tinggi 	<p>Strategi WT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan sumber daya yang ada • Pemerataan pembangunan

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

b. Analisis Deskriptif

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan statistik deskriptif. Analisis ini memberikan gambaran pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan mendalam berdasarkan hasil analisis deskriptif (Kuncoro, 2003). Dalam analisis deskriptif dilakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitian tersebut. Di samping itu juga dilakukan komparasi antara hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian terkait dan dilakukan korelasi antara hasil-hasil penelitian tersebut dengan teori atau konsep yang relevan. Selanjutnya analisis secara deskriptif dapat juga dilakukan dengan teknik statistik yang

relatif sederhana, seperti misalnya menggunakan tabel, grafik, dan prosentase kumulatif. Dengan mengacu pada pengertian analisis deskriptif tersebut maka sekalipun metode analisis yang digunakan dalam riset ini relatif sederhana, namun dapat menjawab tujuan penelitian dalam perumusan rekomendasi kebijakan.

c. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis dan mana yang bukan sektor basis. Formulasi LQ secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut.

$$LQ = \frac{S_i IS}{N_i IN}$$

Keterangan:

LQ	=	Nilai <i>Location Quotient</i>
S _i	=	PDRB sektor I di Kabupaten Lebak
S	=	PDRB total di Kabupaten Lebak
N _i	=	PDRB sektor I di Banten
N	=	PDRB total di Banten

Asumsi yang digunakan adalah:

- Jika nilai $LQ_i > 1$, maka hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi suatu aktivitas di sub wilayah ke-i secara relatif dibandingkan dengan total wilayah atau terjadi pemusatan aktivitas di sub wilayah ke-i.
- Jika nilai $LQ_i = 1$, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa aktivitas setara dengan pangsa total.
- Jika $LQ_i < 1$, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas yang secara umum ditemukan di seluruh wilayah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis Analisis ini digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakah yang termasuk ke dalam sektor basis (*basic economy*) atau berpotensi ekspor dan manakah yang bukan sektor basis (*non basic sector*). Apabila hasil perhitungannya menunjukkan angka lebih dari satu ($LQ > 1$) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari satu ($LQ < 1$) berarti sektor tersebut bukan sektor basis. Hasil perhitungan LQ Kabupaten Lebak selama 7 tahun terakhir (tahun 2005 – 2011) selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut.

Tabel 4.1. Hasil Analisis Indeks *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Lebak Tahun 2005 – 2013

No	Wilayah/Sektor	Tahun									Rata-Rata
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Pertanian	4.84	4.98	5.05	5.16	5.12	4.98	5.13	0.77	0.85	4.10

2	Pertambangan & Penggalian	14.11	14.07	13.97	12.77	11.48	11.11	10.76	15.31	17.17	13.41
3	Industri Pengolahan	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.27	0.30	0.20
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.18	0.21	0.13
5	Bangunan	1.66	1.71	1.74	1.69	1.60	1.54	1.48	2.07	2.21	1.74
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.44	1.42	1.35	1.30	1.28	1.25	1.22	17.18	1.91	3.15
7	Pengangkutan & Komunikasi	0.77	0.79	0.79	0.78	0.74	0.71	0.67	0.95	1.06	0.81
8	Kuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	1.68	1.63	1.51	1.34	1.21	1.18	1.14	1.59	1.70	1.44
9	Jasa-Jasa	3.31	3.31	3.15	3.04	3.03	3.16	3.20	4.70	5.34	3.58

Sumber: Hasil Analisis Data

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat teridentifikasi sektor-sektor yang merupakan sektor-sektor basis maupun sektor non basis. Kabupaten Lebak mempunyai banyak sektor basis, sektor tersebut yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa. Dari banyak sektor basis tersebut, sektor dengan nilai rata-rata indeks paling tinggi adalah sektor pertanian dengan nilai rata-rata indeks 4,10 dan sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai rata-rata indeks 13,41. Khusus untuk sektor pertanian, seperti diketahui bahwa penopang kebutuhan pangan untuk Provinsi Banten adalah Kabupaten Lebak, selain Kabupaten Pandeglang. Sehingga tidak mengeherankan jika sektor ini mampu menyumbangkan pendapatan yang cukup besar kepada PDRB Kabupaten Lebak. Sektor lain yang memungkinkan untuk dikembangkan dan terdapat potensi ekonomi yang cukup tinggi adalah perdagangan. Selain itu, mengingat di Kabupaten Lebak terdapat sentra industri rumahan, yaitu industri pengolahan untuk komoditas gula semut, gula aren, pisang sale, emping melinjo dan tikar pandan. Kondisi ini harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah untuk terus dikembangkan. Potensi ekonomi dari tingkat penyerapan tenaga kerja dan ekonomi juga sangat besar.

Dampak adanya otonomi daerah mempengaruhi dengan tingkat kesenjangan, karena otonomi daerah lebih menggerakkan pemerintah daerah (dalam hal ini kabupaten dan kota) sebagai ujung tombak dari pembangunan. Langkah nyata harus diambil oleh jajaran pemerintahan di Kabupaten Lebak untuk mengurangi tingkat kesenjangan yang terjadi di Kabupaten Lebak. Langkah yang bisa dilakukan diantaranya adalah memaksimalkan fungsi peran masing-masing daerah pengembangan. Dalam RTRW Kabupaten Lebak 2009, telah dilakukan pembagian kawasan berdasarkan kesesuaian

fungsi dan peran masing-masing kecamatan. Secara garis besar tergambar dalam Tabel 4.2. berikut:

Tabel 4.2. Pembagian Kawasan Kesesuaian Kecamatan

No	Kesesuaian Kawasan	Kecamatan
1	Pertanian	Rangkasbitung, Kalanganyar, Cimarga, Leuwidamar, Bojongmanik, Cirinten, Malingping, Banjarsari, Cileles, Gunungkencana, Cibadak, Warunggunung, Maja, Sajira, Cipanas, Lebakgedong, Sobang, Muncang, Bayah, Panggarangan, dan Cibeber
2	Pertambangan	Cibeber, Bojongmanik, Panggarangan dan Bayah
3	Industri	Maja, Rangkasbitung, Ciligrang
4	Pariwisata	Malingping, Panggarangan dan Bayah

Sumber: RTRW Kabupaten Lebak 2009

Di Kabupaten Lebak, terdapat 3 sektor yang merupakan sektor non basis selama periode 2005 – 2013 yaitu sektor pengolahan dengan rata-rata LQ 0,20, sektor listrik, gas, dan air bersih dengan nilai indeks 0,13 dan sektor pengangkutan dan komunikasi dengan rata-rata LQ 0.81. Meskipun sektor basis merupakan sektor yang paling potensial untuk dikembangkan dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak, akan tetapi kita tidak boleh melupakan sektor non basis, karena dengan adanya sektor basis tersebut maka sektor non basis dapat dibantu untuk dikembangkan menjadi sektor basis baru. Dengan terlihatnya komposisi pembagian sektor yang menjadi basis atau unggulan bagi Kabupaten Lebak, seharusnya bisa menjadi salah satu panutan bagi sektor UMKM untuk memulai atau mengembangkan usahanya.

4.2. Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Lebak

Kondisi penggambaran dari tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lebak adalah mengenai kondisi perkembangan penduduk dan tingkat keterserapan tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan untuk melihat komposisi dari jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja serta pengangguran yang ada di Kabupaten Lebak. Permasalahan utama dari bidang ketenagakerjaan adalah: (1) Rendahnya kualitas/SDM para pencari kerja (penganggur); (2) Relatif terbatasnya peluang kerja / kesempatan berusaha di sektor formal; (3) Masih

rendahnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dan masyarakat; dan (4) Banyaknya kasus PHK dan kasus ketenagakerjaan lainnya.

1. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini karena tenaga kerja adalah modal bagi geraknya pembangunan. Masalah penyediaan lapangan kerja menjadi masalah yang cukup serius di Kabupaten Lebak. Kondisi kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan lowongan yang tersedia semakin jauh dari tahun ke tahun.

Tabel 4.3. Kegiatan Informasi Pasar Kerja Tahun 2013

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sisa Pendaftaran Tahun 2011	6.971	5.555	12.526
2	Pencari Kerja yang Terdaftar Tahun 2012	3.691	2.751	6.442
3	Lowongan yang Terdaftar Tahun 2012	259	166	425
4	Penempatan Pencari Kerja Tahun 2012	259	166	425
5	Penghapusan Pencari Kerja 2012	500	2.592	6.092
6	Sisa Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Tahun 2012	690	5.548	12.451

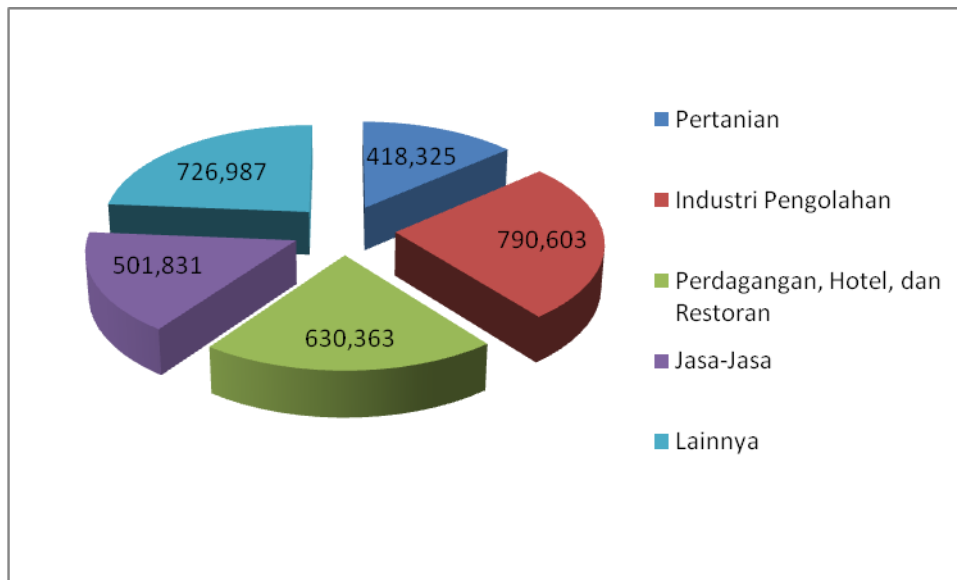
Sumber : Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak (Lebak Dalam Angka 2013)

Permasalahan fundamental yang dihadapi oleh Kabupaten Lebak dan wilayah lain adalah perkembangan jumlah pasar tenaga kerja yang tidak sebanding dengan perkembangan jumlah pencari kerja. Berdasarkan data pada Tabel 4.3, diketahui bahwa untuk sisa pendaftaran Tahun 2011 yang belum mendapatkan pekerjaan sebesar 12.526 jiwa. Kemudian jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan pada Tahun 2012 adalah 12.451 jiwa. Kondisi tersebut mengakibatkan pada tahun 2013, Kabupaten Lebak mempunyai beban dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan lebih dari 19 ribu lowongan. Permasalahan tersebut tentu bukan hal yang mudah untuk diatasi oleh Pemerintah Daerah. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya jumlah angkatan kerja juga terus meningkat. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lebak pada tahun 2008 sebanyak 531.653 orang. Hal ini mengalami kenaikan di tahun 2009 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 545,647 orang. Pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja kembali mengalami peningkatan jumlahnya menjadi 567,194. Sedangkan di tahun 2011 jumlah angkatan kerja menurun menjadi 549,378 jiwa. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja pada tahun 2009 dan 2010. Hal ini dipengaruhi oleh krisis

global yang secara perlahan mempengaruhi jumlah ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Lebak.

Kemudian, berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak Tahun 2013 dapat teridentifikasi bagaimana jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia untuk tahun 2012. Pada tahun 2012 terdapat sejumlah 425 lowongan pekerjaan yang terdaftar untuk laki-laki dan perempuan. Selain itu terdapat sejumlah 6.092 lowongan yang dihapuskan untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah lowongan pekerjaan yang dipenuhi untuk pasar tenaga kerja laki-laki dan perempuan sejumlah 425 lowongan.

Di Kabupaten Lebak terdapat 4 sektor yang menjadi penyumbang penyedia jumlah lapangan pekerjaan yang cukup signifikan. Sektor tersebut adalah sektor pertanian, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja pada tahun 2012 sebesar 418.325 atau sebesar 13,63% dari total penduduk yang bekerja. Selanjutnya adalah industri pengolahan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sejumlah 790.603 atau sebesar 25,77% dari total penduduk yang bekerja. Sesuai dengan hasil analisis LQ, dimana sektor industri pengolahan mempunyai nilai indeks 0,20 atau dapat dikatakan bahwa industri pengolahan belum menjadi sektor basis untuk Kabupaten Lebak. Tetapi melihat tingkat penyerapan jumlah tenaga kerja yang sangat tinggi dapat dikatakan bahwa sektor ini sangat layak dan mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan, karena selain tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi juga di Kabupaten Lebak khususnya UMKM banyak yang sudah mulai berkembang untuk memajukan sektor industri pengolahan ini. Sektor ketiga yang menyumbang penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi adalah perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor ini menyumbang penyerapan tenaga kerja sebanyak 630.363 atau sekitar 20,55% dari total penduduk yang bekerja.



Gambar 4.1. Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2012

Sumber : Lebak Dalam Angka 2013

Jumlah pengangguran yang besar dalam kelompok usia produktif harus menjadi perhatian penuh dari pemerintah Kabupaten Lebak, karena dari tahun ke tahun jumlah pengangguran usia produktif jumlahnya akan terus meningkat yang berasal dari sumbangan jumlah anak usia sekolah yang baru saja lulus, baik itu dari lulusan SMA/SMK sederajat ataupun lulusan S1. Investasi dalam skala besar yang mengalami peningkatan di Kabupaten Lebak. Lokasi yang strategis dan pertumbuhan Kota yang pesat juga mampu menggenjot peningkatan signifikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lebak.

Tabel 4.4. Jumlah Usaha Menengah dan Usaha Besar Menurut kecamatan Tahun 2013

NO	KECAMATAN	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
1	Malingping	2.737	62	1	2.800
2	Wanasalam	1.439	20	1	1.460
3	Panggarangan	2.275	6	-	2.281
4	Cihara	1.259	3	-	1.262
5	Bayah	1.516	33	-	1.549
6	Cilograng	1.725	10	-	1.735
7	Cibeber	2.243	15	1	2.259
8	Cijaku	644	4	-	648
9	Cigemblong	1.153	1	-	1.154
10	Banjarsari	2.214	36	1	2.251
11	cileles	1.357	16	1	1.374
12	Gunung Kencana	1.121	9	-	1.130
13	Bojong Manik	625	-	-	625
14	Cirinten	1.022	2	-	1.024

15	Lewidamar	1.801	17	1	1.819
16	Muncang	924	22	-	946
17	Sobang	1.358	1	-	1.359
18	Cipanas	2.140	43	-	2.183
19	Lebak Gedong	752	4	-	756
20	Sajira	2.680	8	-	2.688
21	Cimarga	2.517	10	-	2.527
22	Cikulur	1.298	4	-	1.302
23	Warunggunung	1.989	15	-	2.004
24	Cibadak	2.215	23	-	2.238
25	Rangkasbitung	4.665	297	1	4.963
26	Kalanganyar	937	27	2	966
27	Maja	1.983	8	-	1.991
28	Curugbitung	915	10	-	925
		47.504	706	9	48.219

Sumber: Dinas KUKM Kabupaten Lebak 2013

Di Kabupaten Lebak potensi UMKM memang cukup besar dan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Peningkatan jumlah UMKM yang terjadi setiap tahunnya ini, juga memberikan peluang kerja yang semakin besar bagi warga Kabupaten Lebak. Hingga akhir 2011, menurut Dinas KUKM tahun 2011 jumlah UMKM di Kabupaten Lebak mencapai 48.219 usaha yang terdiri dari 47.504 usaha mikro, 706 usaha kecil dan 9 usaha menengah. Jumlah usaha yang sebesar itu Dengan potensi yang sangat besar tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi terus berupaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas UMKM yang ada di Kabupaten Lebak, dengan rutin melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan terhadap UMKM tersebut meliputi berbagai hal mulai manajemen usaha sampai upaya untuk meningkatkan kualitas produk yang dipasarkan.

2. Pencari Kerja

Pencari kerja adalah kelompok orang yang dalam periode waktu tertentu tidak melakukan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Pencari kerja ini bisa terdiri dari kelompok yang sudah bekerja atau yang memang sedang menganggur. Khusus untuk pencari kerja di Kabupaten Lebak, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam jumlah pencari kerja dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Permasalahan nyata yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak adalah tingginya jumlah pencari kerja yang tidak dibarengi oleh jumlah lowongan pekerjaan. Pada tahun 2012 masih terdapat jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan dari tahun 2010 yaitu sejumlah 6.971 untuk laki-laki dan 5.575 untuk perempuan. Untuk tahun 2012 sendiri,

juga terdapat pencari pekerjaan yang terdaftar baik itu laki-laki ataupun perempuan yang jumlahnya masih tinggi sejumlah 3.691 untuk laki-laki dan 2.731 untuk perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi tingkat pencari kerja berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Lebak tahun 2012 ditunjukkan pada Tabel 4.5. berikut ini:

Tabel 4.5. Jumlah Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Uraian	17-29		30-44		45-54		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pencari kerja yang belum ditempatkan tahun 2010	6.133	5.199	782	367	56	9	6.971	5.575
2	Pencari kerja yang terdaftar tahun 2012	2.672	1.886	961	828	58	17	3.691	2.731
3	Pencari kerja yang ditempatkan tahun 2012	161	99	81	67	17	-	259	166
4	Pencari kerja yang dihapuskan tahun 2012	3.101	2.193	371	360	28	39	3.500	2.592
5	Pencari kerja yang belum ditempatkan tahun 2012	6.144	5.293	696	251	63	4	6.903	5.548

Sumber: Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak (Lebak Dalam Angka 2013)

Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Lebak yang dari tahun ke tahun semakin berat adalah mengenai penambahan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten lebak, pada tahun 2012 jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan sejumlah 12.451 jiwa, sedangkan jumlah lowongan pekerjaan yang terdaftar dari sektor swasta sebesar 425 dan dari sektor pemerintah tidak ada. Kondisi seperti itu terjadi setiap tahun. Dari jumlah data tersebut, terlihat bahwa dari tahun ke tahun selalu muncul dan bertambah jumlah pengangguran karena kapasitas lowongan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja.

Tabel 4.6. Jumlah Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012

Tingkat Pendidikan	Belum Ditempatkan 2010	Terdaftar Tahun 2012	Penempatan Tahun 2012	Dihapuskan Tahun 2012	Belum Ditempatkan 2012
Tidak/Belum Tamat Sekolah Dasar	0	0	0	0	0
Sekolah Dasar	425	154	12	50	553
SLTP	1.784	948	48	500	2.148

SLTA	7.706	4.552	344	4.383	7.531
DII	471	35	0	150	356
Sarjana Muda/DIII	919	286	16	400	789
Sarjana	1.221	467	5	609	1.074
Jumlah	12.526	12.526	12.526	12.526	12.451

Sumber : Lebak Dalam Angka 2012

Penggambaran data mengenai jumlah pencari kerja dan tingkat keterserapan tenaga kerja yang tidak seimbang, mengharuskan individu untuk mampu berfikir kreatif. Sektor mikro atau UMKM harus memandang hal ini sebagai peluang strategis untuk menangkap dan menyerap ketersediaan jumlah pekerja usia produktif yang sangat besar. Bagi pencari kerja, ide kreatif dan inovatif juga harus muncul, karena potensi Kabupaten Lebak untuk dikembangkan dari sisi sektor UMKM masih sangat terbuka, atau dikatakan mampu untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri.

3. Lowongan Kerja

Menurut data Disnaker Kabupaten Lebak jumlah lowongan kerja yang terdaftar pada tahun 2012 tercatat sebanyak 425 lowongan yang berasal dari sektor swasta, sedangkan dari sektor pemerintahan tidak ada. Sementara pencari kerja yang mendaftar atau belum ditempatkan pada tahun 2012 sebanyak 12.451 orang. Selisih antara jumlah lowongan pekerjaan dan jumlah pencari kerja yang sangat besar tersebut memunculkan masalah yang akan terjadi dari tahun ke tahun. Selain pemerintah yang harus mencari cara bagaimana bisa menghidupkan sektor investasi untuk bisa membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, para pencari kerja juga harus bisa menyesuaikan dengan kualifikasi kebutuhan pasar tenaga kerja. Hal lain yang bisa dilakukan adalah mulai menjadikan sektor UMKM sebagai pasar lapangan pekerjaan yang bisa menghasilkan.

3.3. Analisis SWOT untuk Menentukan Potensi Ekonomi Unggulan dan Strategi Pemberdayaan UMKM

Analisis SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis internal dan eksternal, yaitu (*Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threat*) dari faktor-faktor tersebut sehingga dapat diperoleh beberapa alternatif strategi yang berpengaruh untuk pembangunan daerah. Perhatikan matriks dibawah ini:

	<p>STRENGTH (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letak Kabupaten Lebak strategis - Sarana dan prasarana yang memadai - Komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan dalam proses pembangunan daerah - Penduduk dalam jumlah besar sebagai sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan daerah 	<p>WEAKNESS (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana yang terpusat pada wilayah tertentu - Perkembangan sektor jasa dan perdagangan yang menekan sektor industri - Kesenjangan yang lebar antar penduduk
<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya minat investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Lebak berpotensi berkembangnya kawasan industri sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat • Dibukanya AFTA membuka peluang ekspor dan peningkatan daya saing produk lokal • Terbukanya iklim usaha dapat mendorong peningkatan lapangan kerja sektor informal 	<p>Strategi SO</p> <p>Mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk meningkatkan peran dan manfaat keberadaan UMKM</p>	<p>Strategi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan sumber daya yang ada • Pemerataan pembangunan
<p>THREATS (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dampak globalisasi menimbulkan penurunan nilai-nilai moral masyarakat - Adanya kompetisi antara daerah baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan pusat bisnis berpengaruh terhadap minat investor - Adanya wacana dan rencana pemekaran kabupaten/ kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Lebak 	<p>Strategi ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas sumber daya. • Meningkatkan kualitas produk yang berdaya saing tinggi 	<p>Strategi WT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan sumber daya yang ada • Pemerataan pembangunan

Dari matrik SWOT diatas, dapat dibagi menjadi 4 sel, dengan masing-masing sel mempunyai ciri karakteristik masing-masing. Sel tersebut adalah:

a. *Comparative Advantage*

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat. Keuntungan yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak sebagai daerah yang mempunyai letak geografis sangat strategis membuat minat investor untuk menanamkan modalnya menjadi sangat besar. Sesuai dengan hasil dari LQ, dimana salah satu sektor unggulan yang bisa dikembangkan oleh UMKM adalah sektor pertanian, dan komoditas yang mempunyai peluang sangat besar adalah industri pengolahan. Banyak ragam produk pertanian hortikultura yang bisa menjadi kekuatan potensi ekonomi yang cukup besar untuk dikembangkan oleh insutri pengolahan. Salah satunya adalah produk aren. Aren merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan di Provinsi Banten,penyebaran populasi tanaman aren terpadat di wilayah Kabupaten Lebak. Produk utama tanaman aren adalah gula. Selain keunggulan dari jumlah populasi penyebarannya, kualitas SDM untuk mengolah komoditas ini juga sangat tinggi. Yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai ilmu pemasaran.

Ada bebarapa kekuatan yang bisa menjadi pendukung bagi perkembangan usaha UMKM yang akan dikembangkan. Selain komoditasnya yang strategis, kekuatan pendukung lainnya adalah sarana prasarana yang memadai, dukungan dari pemerintah yang sangat besar, serta jumlah penduduk yang sangat besar sebagai pendukung dari sektor tenaga kerjaan. Dalam strategi yang dikembangkan melalui SWOT pada strategi *strenght opportunity* (SO) nampak bahwa pengembangan perekonomian di Kabupaten Lebak atau daerah tersebut, untuk pertanian, pengolahan, dan sektor unggulan lainnya dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Perkembangannya sangat pesat yang dapat memperkuat struktur perekonomian daerah dengan menempatkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung potensi sumberdaya alam (SDA), dan sektor lainnya yang terkait. Sehingga keberadaan UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian dapat berjalan dengan baik dan memberikan perannya serta manfaat yang maksimal.

Ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing bagi UMKM di Kabupaten Lebak. Salah satunya adalah adanya model Kemitraan Usaha dalam pemasaran gula aren melalui usaha berkelompok (*Wall Usaha*). Model kemitraan ini bisa menjamin adanya pasar untuk menjual hasil output dari usaha UMKM di Lebak. Selain itu, pemerintah daerah juga sudah melakukan pemusatan penampungan produk dan hasil usaha UMKM, dalam program PLUT.

b. *Divestment/Investment*

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi). Selain beberapa keunggulan strategis yang dimiliki oleh pengembangan usaha UMKM di Kabupaten Lebak, ada beberapa permasalahan yang bisa menghambat perkembangan sektor UMKM. Diantaranya adalah sarana dan prasarana yang terpusat pada wilayah tertentu, kualitas SDM yang masih rendah, permodalan, dan perkembangan sektor jasa dan perdagangan yang menekan sektor industri, dan kesenjangan yang lebar antar penduduk.

Permasalahan sarana dan prasarana yang terpusat pada wilayah tertentu juga merupakan permasalahan yang dihadapi bukan hanya oleh Kabupaten Lebak. Permasalahan yang terbesar adalah adanya perkembangan sektor jasa dan perdagangan atau pengolahan yang menekan sektor industri. Sesuai dengan hasil LQ, bahwa salah satu sektor basis Kabupaten Lebak yang besar potensinya untuk dikembangkan UMKM adalah sektor jasa dan pengolahan. Tetapi jika perkembangannya akan menggeser sektor industri, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru, misalnya adalah penyerapan tenaga kerja yang menurun. Strategi yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang kemungkinan bisa timbul adalah dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, dan melakukan pemerataan pembangunan. Dengan adanya pembangunan yang merata, diharapkan terjadi juga pemerataan sarana dan prasarana pendukung

perkembangan UMKM. Sehingga peran UMKM yang saat ini sudah tinggi dalam hal penyerapan tenaga kerja bisa semakin tinggi lagi.

c. *Mobilization*

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Ancaman yang mungkin muncul dari perkembangan UMKM di Kabupaten Lebak diantaranya adalah dampak globalisasi menimbulkan penurunan nilai-nilai moral masyarakat, adanya kompetisi antara daerah baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan pusat bisnis berpengaruh terhadap minat investor, dan adanya wacana dan rencana pemekaran kabupaten/ kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Lebak.

Bentuk strategi yang bisa membuat ancaman yang mungkin muncul dari perkembangan UMKm menjadi peluang diantara adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya dan meningkatkan kualitas produk yang berdaya saing tinggi. Produk yang dikembangkan oleh UMKM harus mempunyai nilai khas yang bisa menjadi keunggulan output dari UMKM tersebut dibandingkan dengan hasil dari produsen lain. Selain itu, untuk menjaga moral dari sumber daya manusia yang ada harus ada pengembangan SDM yang mempunyai daya saing tinggi.

d. *Damage Control*

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan. Sektor ancaman yang mungkin muncul dari usaha pengembangan UMKM harus dihadapi dengan strategi yang benar. Penggunaan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien serta adanya pemerataan pembangunan bisa menjadi salah satu alternatif strategi yang bisa digunakan dalam pengembangan UMKM. Selain itu, sumber daya manusia dan pilihan produk yang menjadi inti dari pengembangan UMKM juga harus mempunyai daya saing yang tinggi. Pemerintah

selaku pihak yang mempunyai peranan dari sisi legalitas harus bisa memberikan dukungan yang besar terhadap UMKM, dan juga melindungi usaha yang dilakukannya dari ancaman pihak luar dengan kekuatan sumber daya yang lebih besar.

3.4. Rekomendasi Strategi Pengembangan UMKM

Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, berikut beberapa pilihan strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan UMKM, yaitu:

1. Kemudahan dalam Akses Permodalan

Salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM adalah aspek permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan UMKM pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

Yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan UMKM melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten. (4) Bagaimana memertahankan sistem pendanaan yang sudah berjalan baik. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Cara yang cukup efektif dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas UMKM ini, Perbankan harus menjadikan sektor ini sebagai pilar terpenting perekonomian negeri. Bank diharapkan tidak lagi hanya memburu perusahaan-perusahaan yang telah mapan, akan tetapi juga menjadi pelopor untuk mengembangkan potensi perekonomian dengan menumbuhkan wirausahawan melalui dukungan akses permodalan bagi pengembangan wirausaha baru di sektor UMKM. Perbankan harus meningkatkan kompetensinya dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah dengan memberikan solusi total mulai dari menjaring wirausahawan baru potensial, membinanya hingga menumbuhkannya. Pemberian kredit inilah satu mata rantai dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah secara utuh.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan UMKM adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Pengembangan Skala Usaha

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk

membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha

Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan kluster. Pola-pola jaringan semacam ini sudah terbentuk akan tetapi dalam realitasnya masih belum berjalan optimal. Pola jaringan usaha melalui sub kontrak dapat dijadikan sebagai alternatif bagi eksistensi UMKM di Indonesia, tetapi sayangnya banyak industri kecil yang justru tidak memiliki jaringan sub kontrak dan keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga eksistensinya pun menjadi sangat rentan. Sedangkan pola pengembangan jaringan melalui pendekatan kluster, diharapkan menghasilkan produk oleh produsen yang berada di dalam kluster bisnis sehingga mempunyai peluang untuk menjadi produk yang mempunyai keunggulan kompetitif dan dapat bersaing di pasar global.

Selain jaringan usaha, jaringan pemasaran juga menjadi salah satu kendala yang selama ini juga menjadi faktor penghambat bagi UMKM untuk berkembang. Upaya pengembangan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi misalnya kontak dengan berbagai pusat-pusat informasi bisnis, asosiasi-asosiasi dagang baik di dalam maupun di luar negeri, pendirian dan pembentukan pusat-pusat data bisnis UMKM serta pengembangan situs-situs UMKM di seluruh kantor perwakilan pemerintah di luar negeri.

Penguatan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UMKM, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi

akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap usaha termasuk juga di sektor usaha kecil. Keberhasilan industri skala kecil untuk menembus pasar global atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik ditentukan oleh kemampuan pelaku-pelaku dalam industri kecil tersebut untuk mengembangkan produk-produk usahanya sehingga tetap dapat eksis. Kelemahan utama pengembangan usaha kecil menengah di Indonesia adalah karena kurangnya ketrampilan sumber daya manusia. Manajemen yang ada relatif masih tradisional.

Oleh karena itu dalam pengembangan usaha kecil menengah, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilan dalam pengembangan usaha. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan lokakarya, on the job training, pemagangan dan kerja sama usaha. Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

Selain itu, salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia di sektor UMKM adalah Pendampingan. Pendampingan UMKM memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Pengalaman empirik dari pelaksanaan IDT, P3DT, dan PPK, dengan adanya pendamping, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun.

6. Peningkatan Akses Teknologi

Penguasaan teknologi merupakan salah satu faktor penting bagi pengembangan UMKM. Di negara-negara maju keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditentukan oleh kemampuan akan penguasaan teknologi. Strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan akses teknologi bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah memotivasi berbagai lembaga penelitian teknologi yang lebih berorientasi untuk peningkatan teknologi sesuai kebutuhan UMKM, pengembangan pusat inovasi desain sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan pusat penyuluhan dan difusi teknologi yang lebih tersebar ke lokasi-lokasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan peningkatan kerjasama antara asosiasi-asosiasi UMKM dengan perguruan tinggi atau pusat-pusat penelitian untuk pengembangan teknologi UMKM.

7. Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah akan sangat ditentukan dengan ada atau tidaknya iklim bisnis yang menunjang perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Persoalan yang selama ini terjadi iklim bisnis kurang kondusif dalam menunjang perkembangan usaha seperti terlihat dengan masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum dan berbagai peraturan daerah yang tidak pro bisnis merupakan bukti adanya iklim yang kurang kondusif. Oleh karena perbaikan iklim bisnis yang lebih kondusif dengan melakukan reformasi dan deregulasi perijinan bagi UMKM merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mengembangkan UMKM. Dalam hal ini perlu ada upaya untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi keberlangsungan dan peningkatan kinerja UMKM. Selain itu perlu ada tindakan untuk melakukan penghapusan berbagai pungutan yang tidak tepat, keterpaduan kebijakan lintas sektoral, serta pengawasan dan pembelaan terhadap praktek-praktek persaingan usahah yang tidak sehat dan didukung penyempurnaan perundang-undangan serta pengembangan kelembagaan.

8. Payung hukum

Pemberian payung hukum ditujukan untuk memberikan jaminan dan pengakuan dari pemerintah daerah mengenai bentuk dan jenis komoditas yang bisa dikategorikan

sebagai unggulan. Status unggulan disini bisa membuat adanya konsentrasi dan perlakuan yang khusus terhadap produk tertentu. Diharapkan dengan adanya payung hukum yang diakui oleh pemerintah dan pihak yang berkompeten akan membantu para pelaku UMKM untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk tersebut, atau mampu menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual tinggi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil kajian penelitian mengenai Potensi Ekonomi Daerah Dan Peran UMKM dalam Usaha Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Lebak dapat disimpulkan bahwa:

- a. Hasil dari LQ diketahui bahwa di Kabupaten Lebak terdapat 6 sektor yang merupakan sektor basis, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa.
- b. Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor dominan berada dalam dalam sektor industri pengolahan.
- c. Hasil SWOT diketahui bahwa strategi yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan potensi dari sektor industri pengolahan produk hortikultura, memperbaiki kualitas SDM, dan memberikan payung hukum mengenai jenis produk unggulan.

A. SARAN

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti mengenai Potensi Ekonomi Daerah dalam Pengembangan UMKM Unggulan dengan Studi Kasus di Kota Tangerang adalah:

- a. Diberikan pelatihan dan pembimbingan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Lebak.
- b. Dibentuk pusat aktifitas yang memfasilitasi proses produksi dari pelaku UMKM di Kabupaten Lebak.
- c. Untuk meningkatkan daya saing, pengembangan kualitas SDM dan pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas utama.
- d. Permasalahan mengenai permodalan dan pengembangan jaringan usaha harus dilakukan dengan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah.

- e. Diberikan payung hukum mengenai jenis dan jumlah komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Lebak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2012. Modul Ekonomi Pembangunan Lanjutan ESPA4324, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima, Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN.
- _____. 2008. Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas, Yogyakarta: PT Andi Offset.
- Banten dalam Angka, 2007. Badan Pusat Statistik Banten.
- _____, 2004. Badan Pusat Statistik Banten
- _____, Beberapa Edisi. Badan Pusat Statistik Banten
- Badan Pusat Statistik, 2007. *Indikator Utama Ekonomi Indonesia*. Jakarta
- _____, 1999. *Indikator Utama Ekonomi Indonesia*. Jakarta
- _____, Berbagai Edisi. *Indikator Utama Ekonomi Indonesia..* Jakarta
- _____, 2009. *Indikator Utama Ekonomi Indonesia*. Jakarta
- Berry, A., E. Rodriguez, dan H. Sandeem, (2001) "Small and Medium Enterprises Dynamics in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37 (3): 363-384.
- BPS Kabupaten Lebak, 2009. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebak 2008*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak: Lebak
- _____, 2009. *Kabupaten Lebak Dalam Angka 2008*. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten: Lebak
- _____, 2009. *Hasil Pendataan Data Pokok Kabupaten Lebak 2008*. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten: Lebak
- _____, 2013. *Hasil Pendataan Data Pokok Kabupaten Lebak 2013*. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten: Lebak
-

Departemen Koperasi (www.depkop.go.id). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2006 - 2010.

Gillis, Malcolm et al. 2001. *Economics of Development*, Fourth Edition, New York: W.W. Norton & Company.

Gofur Ahmad. 2004. Analisis Potensi Usaha pengrajin Sentra Industri Kecil Garmen. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Program Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Jakarta.

<http://www.lebakkab.go.id>. Departemen Koperasi. Jumlah UMKM dan Koperasi Tahun 2012. Diunduh Tanggal 24 April 2013.

Ikhsan, M. 1999. *The Disaggregation of Indonesian Poverty : Policy and Analysis*. Ph.D. Dissertation. University of Illinois, Urbana.

Kementerian Koperasi dan UMKM (2012). *Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)*. Didownload dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=318:data-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-dan-usaha-besar-ub-tahun-2010-2011&Itemid=93 ada tanggal 24 April 2013

Kuncoro, Mudrajat, (2003), *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

-----, 2007. *Ekonomi Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030*. Yogyakarta: Andi Offset

Lebak Dalam Angka. 2008. Badan Pusat Statistik Banten.

Lebak dalam Angka 2013. Pembagian Kawasan Kesesuaian Kecamatan. RTRW Kabupaten Lebak 2009.

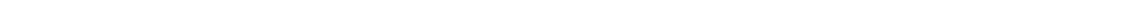
Michael P Todaro dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi : Edisi Sembilan*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Mohammad Jafar Hafsah, 2004. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004

- Priyono, Edy, (2004), *Usaha Kecil Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi : Berkaca Dari Pengalaman Taiwan*, dalam Jurnal Analisis Sosial Volume 9 No. 2 Agustus 2004.
- Rangkuti, Freddy. 1997. Analisis SWOT. Analisis Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rusdarti. 2010. Potensi Ekonomi Daerah Dalam Pengembangan UMKM Unggulan Di Kabupaten Semarang. JEJAK, Volume 3 Nomer 2, September 2010.
- Sriyana, Jaka. 2010. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Di Kabupaten Bantul Paper pada Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif
- Sopannah. (2010). Peran dan Permasalahan Usaha Mikro. <http://siap-bos.blogspot.com/2009/05/peran-dan-permasalahan-usaha-mikro.html>.
Diunduh Tanggal 22 Oktober 2013
- Sulaeman, Suhendar, 2004. Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global. Infokop Nomor 25 Tahun XX.
- Susilo, S.Y., Krisnadewara, P.D., dan Soeroso, A., (2008), "Masalah dan Kinerja Industri kecil Pascagempa: Kasus di Kabupaten Klaten (Jateng) dan Kabupaten Bantul (DIY)", *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 15 No. 2, Agustus 2008, hal. 271 – 280
- Susilo, S.Y., dan Krisnadewara, P.D., (2007), "Strategi Bertahan Industri Kecil Pascagempa Bumi di Yogyakarta", *Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9 No. 2, Juni 2007, hal. 127 – 146
- Tarigan, Y.P., dan Sri Susilo, Y., (2008), "Masalah dan Kinerja Industri Kecil Pascagempa: Kasus Pada Industri Kerajinan Perak Kotagede Yogyakarta", *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 8 No. 2, Mei 2008, hal. 188 – 199
- Tambunan, Tulus (2000), *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya
-

Tambunan, Tulus (2003), Perkembangan UMKM dalam Era AFTA: Peluang, Tantangan, Permasalahan dan Alternatif Solusinya. Paper Diskusi pada Yayasan indonesia Forum

Tambunan, Tulus (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia. Isu-Isu Penting. LP3ES. Jakarta



Lampiran 1. Penggunaan Dana

1. Honor				
Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per Tahun (Rp)
Ketua	8,000	12	28	2,688,000
Anggota 1	7,000	11	28	2,156,000
SUB TOTAL (Rp)				4,844,000
2. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)
Kertas	Rim	12	50,000	600,000
CD, Amplop, Map	Set	20	10,000	200,000
Biaya Internet	Bulan	8	150,000	1,200,000
Tinta Printer Black and White	Set	2	750,000	1,500,000
Souvenir	Set	150	40,000	6,000,000
Fotocopy	Lembar	2260	100	226,000
SUB TOTAL (Rp)				9,726,000
3. Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)
Transport Pengambilan Data Ke BPS Pusat	Orang Hari	16	110,000	1,760,000
Transport Pengambilan Data Ke Kabupaten Lebak	Orang Hari	16	110,000	1,760,000
Transport Pengambilan Data BPS Provinsi	Orang Hari	16	110,000	1,760,000
SUB TOTAL (Rp)				5,280,000
4. Lain-Lain				
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)
Entry Data	Hari	5	220,000	1,100,000
Olah Data	Hari	8	220,000	1,760,000
Analisis Data	Hari	8	220,000	1,760,000
Penulisan Laporan Antara/Sementara	Hari	8	220,000	1,760,000
Penulisan Laporan Akhir	Hari	8	220,000	1,760,000
Penggandaan Laporan Penelitian	Eksemplar	3	220,000	660,000
Seminar dan Publikasi	Laporan	1	750,000	750,000
Uang Harian Enumerator	Orang	3	200,000	600,000
SUB TOTAL (Rp)				10,150,000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN (Rp)				30,000,000

Lampiran 2. Dukungan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
Akses jurnal	Tersedia di Puslata Universitas Terbuka, antara lain : - Gale, Ebscho, Proquest, E-book dan lain sebagainya
Akses data	Dari Bappeda, Pemda, BPS
Buku-buku pendukung	Sebagian ada di Perpustakaan Universitas Terbuka. Namun demikian beberapa data harus mencari pada institusi yang bersangkutan

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim dan Pembagian Tugas

No.	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/mgg)	Uraian Tugas
1.	Arief Rahman Susila (0013028203)	Universitas Terbuka	Ekonomi	4	- Merancang penelitian - Membuat pemetaan riset
2.	CB. Supartomo (0022105203)	Universitas Terbuka	Ekonomi	4	- Melakukan coding data sampai analisis data
3.	Tenaga teknis	Universitas Terbuka	-	2	Membantu administrasi penelitian

Lampiran 3. Biodata Ketua Tim Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Arief Rahman Susila, SE., M.Si
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19820213 200501 1 002
5	NIDN	0013028203
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Magelang, 13 Februari 1982
7	E-mail	ariefrs@ut.ac.id
9	Nomor Telepon/HP	082122026933
10	Alamat Kantor	Jalan Cabe Raya, Tangerang Selatan
11	Nomor Telepon/Faks	021-7490941 ex: 2105/ 021-7434491
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = ... orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
13. Mata Kuliah yg Diampu		1. Pengantar Ekonomi Makro
		2. Ekonomi Pembangunan
		3. Ekonomi Internasional

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	UMS	IPB
Bidang Ilmu	IESP	PWD
Tahun Masuk-Lulus	2000 – 2004	2008 - 2011
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Serta Produk Domestik Bruto Dengan Menggunakan Metode Granger	Analisis Sebaran Kemiskinan dan Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Lebak
Nama Pembimbing/Promotor	DR. Bambang Setiaji	a. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr b. Dr. Ir. Baba Barus, M.Sc

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2013	Potensi Ekonomi Daerah Dalam Pengembangan Umkm Unggulan Di Kota Tangerang	Dikti	15 Juta
2.	2013	Analisis Pola Sebaran Kemiskinan di Kabupaten Lebak	Bappeda Pemerintah Kabupaten Lebak	35 Juta
3.	2012	Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nabire	Bappeda Pemerintah Kabupaten Nabire	150 juta
4.	2012	Analisis Sebaran Kemiskinan di Kabupaten Lebak	LPPM-UT	30 juta
5.	2012	Masterplan Peningkatan <i>Incoming Student</i> Di Universitas Terbuka	LPPM-UT	50 juta
6.	2011	Analisis Exit Survey Mahasiswa (<i>Multi Years</i>)	PAU-UT	@ 5 juta
7.	2008	Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah Dan Produk Domestik Bruto Dengan Menggunakan Metode Granger	LPPM-UT	10 juta
8.	2007	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kendaraan Roda Dua (Motor) Di DKI Jakarta Tahun 1990-2006	LPPM-UT	15 juta
9.	2008	Hubungan (Korelasi) Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri : Faktor-faktor yang Menentukan Tingkat Profitabilitas Sektor Agroindustri di Indonesia	LPPM-UT	10 juta

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
10.	2006	Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi Dengan Tingkat Partisipasi Akan Tenaga Kerja di Propinsi Banten	LPPM-UT	1 juta

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2013	Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ciseeng Kabupaten Bogor	LPPM UT	
2.	2012	Penilaian Kinerja Praktis pada Asosiasi BMT se kabupaten dan kota Bogor, Jawa Barat	LPPM UT	
3.	2012	Mengikuti kegiatan penjualan barang belas dan pasar murah dalam rangka Dies Natalis Universitas Terbuka	LPPM UT	
4.	2012	Koordinator TPI UAN SMK Kabupaten Tangerang	DIKNAS Propinsi Banten	
5.	2013	Koordinator TPI UAN SMK Kabupaten Tangerang	DIKNAS Propinsi Banten	

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1			

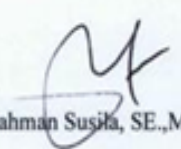
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis	Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Pengembangan Pasar Regional dan Global.	UNP Padang pada tanggal 1 November 2012
2	Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka	Analisis Sebaran Kemiskinan Di Kabupaten Lebak Dan Kebijakan Penanggulangannya.	UTCC Universitas Terbuka pada tanggal 12 Desember 2012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Keilmuan Lanjut.

Jakarta, 13 September 2014
Pengusul



(Arief Rahman Susila, SE.,M.Si)